LAPORAN PENELITIAN
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAGI BADAN PUBLIK DAERAH

Disusun oleh:

Siti Raudloh (Ketua)
Kasman (Anggota)
Yenni Febtaria W. (Anggota)
Asry Kurniawati (Anggota)

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
MATARAM, 2017

LAPORAN PENELITIAN

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI BADAN PUBLIK DAERAH

Disusunoleh:
Siti Raudloh (Ketua)
Kasman (Anggota)
Yeni Febtaria W. (Anggota)
Asry Kurniawaty (Anggota)

KANTOR BAHASANUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
MATARAM, 2017

PENELITIAN
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAGI BADAN PUBLIK DAERAH

Disusun oleh:
Siti Raudloh (Ketua)
Kasman (Anggota)
Yeni Febtaria W. (Anggota)
Asry Kurniawaty (Anggota)

Penelitian ini telah diperiksa oleh

Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat

Mataram, Oktober 2017

Dr. Syarifuddin, M.Hum.
NIP19740215200501 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga laporan penelitian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daerah di Kabupaten Lombok Barat dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian tentang pemantauan penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik daerah belum pernah dilakukan.

Penelitian ini merupakan titik pijak dari serangkaian kegiatan penelitian kelompok Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Keberhasilan penyelesaian penelitian ini tidak akan lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan penelitian ini. Secara khusus peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dan anggota tim peneliti yang sama-sama menyelesaikan penelitian ini.

Harapan kami, semoga penelitian ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa.

Mataram, Oktober 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 3

1.4 Manfaat Penelitian 3

1.5 Tinjauan Pustaka 3

1.5.1 Sikap Bahasa 3

1.5.2 Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang 6

1.6 Kerangka Teori 7

1.6.1 Peraturan Mengenai Kebahasaan 7

1.6.2 Badan Publik 9

1.6.3 Penggunaan Bahasa 9

1.6.4 Sikap Bahasa 13

1.6.5 Unsur-Unsur Sikap Bahasa 14

1.7 Metode Penelitian 16

1.7.1 Populasi dan Sampel Penelitian 16

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 17

1.7.2.1 Wawancara 18

1.7.2.2 Survei 18

1.7.3 Indikator Sikap Bahasa, Klasifikasi dan Perhitungan Indeks 19

1.7.4 Metode Analisis Data 21

1.7.5 Instrumen 23

1.7.6 Penyajian Analisis Data 23

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 24

2.1 Sejarah 26

2.2 Kehidupan Sosial dan Budaya 25

BAB III PEMBAHASAN 33
3.1 Pengolahan Data 33
3.2 Ciri-ciri Responden Sikap Pengguna Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat 36
3.3 Sikap Pengguna Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat 39
3.3.1 Uji Normalitas 39
3.3.2 Rerata Sikap Pengguna Bahasa 46
3.3.3 Analisis Korelasi Rank Spearman 48
3.4 Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat 51
BAB IV PENUTUP 58
4.1 Simpulan 58
4.2 Saran 58
Daftar Putaka 58
LAMPIRAN
1. Intrumen Penelitian
2. Data analisis kesalahan berbahasa Indonesia di badan publik

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Dimensi dan Indikator Sikap Bahasa 19

Tabel 2 Konversi Nilai Kualitatif 22

Tabel 3 Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat 25

Tabel 4 Jumlah Penduduk di tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat 25

Tabel 5 Konversi Nilai Tanyaan Positif 33

Tabel 6 Konversi Nilai Tanyaan Negatif 34

Tabel 7 Derajat Sikap dan Penggunaan BI di Badan Publik 35

Tabel 8 Derajat Korelasi Sikap dan Penggunaan BI di Badan Publik 35

Tabel 9 Uji Normalitas Usia 39

Tabel 10 Uji Normalitas Pendidikan 40

Tabel 11 Uji Normalitas Jenis Kelamin 41

Tabel 12 Uji Normalitas Bahasa Pertama 42

Tabel 13 Uji Normalitas Bahasa yang Dikuasai 43

Tabel 14 Uji Normalitas Identitas Kependudukan 44

Tabel 15 Uji Normalitas Mobilitas 45

Tabel 16 Rerata Per Item Pertanyaan 46

Tabel 17 Rata-Rata Secara Keseluruhan 48

Tabel 18 Analisis Korelasi Rank Spearman 48

Tabel 19 Persentase Kesalahan Penggunaan BI 58

Abstrak

Penelitian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daerah di Kabupaten Lombok Barat merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap pengguna bahasa Indonesia dan kesalahan berbahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat. Data yang digunakan ada dua jenis data, pertama data foto tulisan bahasa Indonesia pada spanduk, binder, papan nama, dan papan pengumuman di Badan Publik. Kedua berupa kuesioner tentang sikap pengguna bahasa Indonesia di Badan Publik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan survei menggunakan instrumen penelitian yang telah disusun. Data diolah menggunakan tahapan indeks per butir soal, komponen, dan aspek total. Data tersebut diolah menggunakan statistik sederhana seperti MS Excell dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan sikap pengguna bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat dari aspek kognitif tergolong dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 0,62. Sedangkan pada aspek afektif memiliki nilai rata-rata sebesar 0,81 tergolong dalam kategori sangat baik yang terletak pada interval 0,81—1. Korelasi antarvariabel hampir semua tergolong sangat lemah dan tidak signifikan kecuali pada variabel identitas kependudukan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel kognitif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,302, variabel usia responden memiliki pengaruh kuat terhadap variabel tingkat pendidikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,507, variabel usia responden memiliki pengaruh cukup kuat terhadap variabel mobilitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,371, dan variabel pendidikan memiliki pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap variabel mobilitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,409. Dari segi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di Badan Publik didominasi oleh kesalahan penggunaan ejaan dan struktur bahasa asing.

Kata kunci: badan publik, sikap bahasa, kognitif, afektif

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggunakan Bahasa Indonesia adalah salah satu amanat dari Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda pula, bertekad untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Tekad tersebut dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya sumpah ini dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Sayangnya sumpah menggunakan Bahasa Indonesia ini seakan menjadi sia-sia ketika kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan justru banyak terdapat pelanggaran terhadap keharusan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa, hal tersebut mempersempit ruang pergerakan bahasa Indonesia di hadapan masyarakatnya sendiri. Pelanggaran yang paling memprihatinkan adalah ketika di ruang publik, ruang yang notabennya banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik lokal maupun asing, justru penggunaan bahasa Indonesia seakan dinomor-sekiankan. Misalnya saja, penamaan gedung, jalan, perkantoran, permukiman, lembaga usaha, lembaga pendidikan banyak menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan gengsi dan nilai jual. Padahal, organisasi atau badan usaha tersebut dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Fenomena lain terjadi pada pengguna bahasa itu sendiri, mereka merasa lebih bangga dan terpelajar jika bisa berbicara dengan bahasa asing. Pekerja kantor pun lebih nyaman menggunakan kata *meeting* ketimbang rapat. Istilah *delete* lebih akrab dibanding hapus. Begitu pun *copy* untuk salin, *Network* untuk jejaring, *Download* buat unduh, *workshop* untuk 'sanggar kerja', serta *upload* untuk unggah. Kantor pemerintah atau badan publik adalah tempat-tempat sumber daya manusia yang memiliki pendidikan relatif tinggi. Seharusnya mereka lebih cerdas dalam memilah kapan dia perlu menggunakan bahasa asing dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Karena, yang membuat bahasa Indonesia lebih memiliki tempat adalah penggunanya itu sendiri.

Fenomena maraknya kembali penggunaan istilah asing tersebut, kita bisa melihat betapa rapuhnya karakter bangsa di masa kini. Seakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang labil, tidak memiliki keteguhan dan pendirian kuat, serta kehilangan identitas kebangsaannya, karena seperti yang kerap kita dengar bahwa *bahasa menunjukkan bangsa.* Maka perlu adanya upaya kuat untuk menata dan membangun kembali karakter bangsa bagi generasi pelapis. Selain itu, perlu adanya peraturan keras dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam konstitusi dan undang-undang bahasa. Oleh karena itu, saat ini yang terpenting adalah kesadaran pemerintah Indonesia dan pelaku bahasa itu sendiri untuk mengembalikan identitas bangsa lewat bahasa.

Kepedulian masyarakat pengguna bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu berkaitan erat dengan sikap bahasa seseorang. Garvin dan Mathiot dalam (Suwito, 1983) mengemukakan bahwa sikap bahasa itu setidak-tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa (loyalitas bahasa), kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Dengan demikian, ketika seseorang akan menggunakan suatu Bahasa akan dipengaruhi oleh beberap faktor, di antaranya adalah sikap bahasa.

Berpijak pada latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik Kabupaten Lombok Barat. Penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam berbahasa karena belum diketahui apakah mereka sudah mengetahui peraturan perundangang-undangan yang mengatur penggunaan berbahasa di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua masalah utama yang akan menjadi topik kajian dalam penelitian penggunaan bahasa indonesia bagi badan publik daerah, yaitu sikap bahasa pegawai badan publik dan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di badan publik. Kedua topik tersebut dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut.

(1) Bagaimanakah bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indoensia di badan publik Kabupaten Lombok Barat?

(2) Bagaimanakah sikap bahasa pegawai di badan publik Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan perencanaan pengembangan dan pembinaan bahasa di daerah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indoensia di badan publik Kabupaten Lombok Barat.
2) Mengetahui sikap bahasa pegawai di badan publik Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretisnya adalah bahwa hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan linguistik. Diperolehnya simpulan mengenai bentuk kesalahan penggunaan bahasa indonesia bagi badan publik dan sikap bahasa pegawai badan publik Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis karena dapat digunakan untuk menentukan regulasi dan kebijakan, khususnya mengenai kebahasaan di badan publik Kabupaten Lombok Barat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Sikap Bahasa

Penelitian sikap bahasa sudah banyak dilakukan orang, di antaranya adalah sebagai berikut. Gunarwan (1983) dalam tulisannya yang berjudul "Reaksi Subjektif terhadap Bahasa Indonesia Baku dan Non-baku" itu dapat membuktikan adanya sikap positif dari kalangan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia baku. Sikap mahasiswa seperti itu akan berpengaruh terhadap sikap masyarakat yang

lain terhadap penggunaan bahasa Indonesia baku. Adapun Kridalaksana (1982) dalam tulisannya menyatakan bahwa orang Indonesia lebih menyukai penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) daripada bahasa Indonesia. Kenyataan itu membuktikan bahwa sikap orang Indonesia tidak menghargai bahasa nasionalnya sendiri.

Penelitian mengenai sikap bahasa dengan fokus di NTB sudah dilaksanakan oleh Hariro dkk. (2013) dalam kerangka penelitian "Ekspedisi Bahasa dan Sastra di Wilayah Wisata di Pulau Lombok dan Sumbawa."Kajian mengambil dua objek wisata terkenal, yaitu Senggigi di Pulau Lombok dan Maluk di Pulau Sumbawa. Kajian ini mendeskripsikan sikap masyarakat dan pelaku wisata di dua daerah tersebut secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan kedua daerah memiliki sikap yang berbeda terhadap bahasa daerah, Indonesia, dan asing. Kemampuan berbahasa daerah dan Indonesia masyarakat di Senggigi baik dan sebagian dari mereka dapat memiliki kemampuan berbahasa asing. Mereka memiliki sikap negatif terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia, tetapi cukup positif terhadap bahasa asing.Berbeda dengan daerah Senggigi, masyarakat di Maluk memiliki kemampuan berbahada daerah yang rendah, tetapi memiliki kemampuan yang cukup tinggi terhadap bahasa Indonesia.Hal ini disebabkan karena komposisi masyarakat Maluk yang beragam.

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Husnan dkk. (2014) dalam kerangka penelitian "Sikap Penutur Bahasa Indonesia di Wilayah Wisata di Pulau Lombok" Kajian tersebut mengambil dua objek wisata yang cukup ramai, yaitu Pantai Kuta dan Pemenang Timur (Bangsal-Trawangan).Hasil kajian menunjukkan masyarakat yang terdiri atas aparat pemerintah, pedagang, pengusaha, dan penyedia jasa wisata di kedua daerah penelitian mampu menggunakan bahasa daerah dengan baik. Responden mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik meskipun masih kurang dalam hal kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Kajian tersebut juga mendeskripsikan persentase sikap bahasa responden terhadap bahasa daerah.Kajian menerangkan bahwa responden suka (79%) dan senang (82%) terhadap bahasa daerah.Alasan yang disampaikan adalah karena bahasa daerah itu mudah (56%). Responden menyatakan suka

(92%) dan senang (87%) terhadap bahasa Indonesia karena menganggap bahasa Indonesia bahasa kebangsaan dan bahasa negara (56%). Responden juga menyatakan kesukaan (79%) dan kesenangan (64%) terhadap bahasa asing karena dianggap bahasa yang modern (31%).

Kajian yang lain dilakukan oleh (Wahidah, 2014) yang bejudul "*Language Attitude* Masyarakat Pedaleman Suralaga Lombok TImur terhadap Bahasa Halus" disampaikan dalam Kongres Bahasa Daerah NTB 2014. Kajian menunjukkan ciri ketidaksetiaan, kebanggan 'bahasa halus' masyarakat pedaleman Suralaga rendah.Kajian tersebut juga menunjukkan kurangnya kesadaran berbahasa halus.Hasilnya, sikap masyarakat pedaleman Suralaga terhadap bahasa alus tergolong negatif. Hal ini disebabkan oleh faktor kedwibahasaan penutur; usia; kondisi lingkungan; tidak adanya keteladanan berbahasa; perkawinan campuran; adaptasi terhadap lingkungan baru; faktor ekonomi; dan faktor ragam, kosakata, minimnya kebutuhan, dan kurangnya keinginan untuk belajar bahasa halus.

Pada tahun 2015 Husnan dkk. juga melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang di NTB" (Laporan Penelitian Kantor Bahasa Provinsi NTB). penelitian ini mengambil empat daerah pengamatan di Provinsi NTB, yaitu Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat. Hasilnya adalah Sikap pengguna bahasa Indonesia di media luar ruang tergolong cukup baik dengan nilai 0,6. Nilai ini tergolong cukup baik sesuai dengan julat sikap pengguna bahasa Indonesia dim media luar ruang, yaitu 0,46—0,6. Komponen aspek kognitif dengan aspek afektif memiliki nilai korelasi 0,018. Nilai ini tergolong sangat rendah <0,020 sesuai dengan julat korelasi sikap pengguna bahasa Indonesia di media luar ruang. Nilai ini menunjukkan bahwa aspek kognitif tidak dapat berpengaruh pada aspek afektif sikap pengguna bahasa Indonesia di media luar ruang. Simpulan lainnya adalahkesalahan penggunaan istilah dan kata bahasa asing memiliki persentase paling tinggi, yaitu 48%. Kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca memiliki persentase cukup tinggi yaitu 30%.

1.5.2 Penggunaan Bahasa Indonesia

Sepengetahuan peneliti kajian terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik belum pernah dilakukan, namun demikian ada beberapa penelitian yang menyerupai dan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Beberapa kajian yang dimaksud secara ringkas disampaikan dalam penelitian ini sebagai referensi dan pijakan berpikir.

Kajian tersebut antara lain dilakukan Sri Indrawati (2008) dengan judul "Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga, Sudah Benarkah?"; Ratna Susanti dengan judul "Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Media Luar Ruang di Kota Klaten". Noviandy (2014) dengan judul "Persepsi Masyarakat tentang Penggunaan Iklan Memdia Luar Ruang terhadap Estetika Kota Samarinda"; kajian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Surakarta yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2012); dan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB (2007-2008).

Indrawati (2008:3) menjelaskan bahwa konsekuensi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar luar dapat menimbulkan konsekuensi bagi para pemakai bahasa dan kegamangan perkembangan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang. Dalam kajiannya, Indrawati menemukan penulisan menggunakan bahasa daerah dan asing serta kesalahan penulisan.

Kajian yang dilakukan oleh Susanti menemukan masih banyaknya kesalahan penulisan bahasa di media luar ruang di Kota Klaten. Kesalahan yang dimaskuda adalah belum atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia juga memberikan contoh kesalahan yang ditemukan, yaitu penulisan tanda baca, penulisan singkatan, kesalahan penggunaan huruf capital, kesalahan pemlihan kata, dan kesalahan ejaan.

Noviandy (2014: 417) melakukan kajian persepsi masyarakat Kota Samarinda terhadap penggunaan iklan di media luar ruang. Noviandy (2014: 429) menemukan bahwa masyarakat Kota Samarinda tidak menyukai kondisi iklan

media luar ruang dan tidak menyukai ketidateraturan penggunaan media luar ruang karena dapat merusak pemandangan.

Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Surakarta yang dilaakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menemukan adanya penulisan nama jalan menggunakan aksara jawa termasuk nama perusahaan; penggunaan bahasa asing pada papan nama; penulisan ejaan yang tidak tepat. Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di NTB yang dilakukan oleh Tim Kantor Bahasa Provinsi NTB menemukan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada tataran ejaan, penggunaan tanda baca, dan struktur tulisan yang dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah.

Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang masih tidak mengikuti aturan sesuai dengan norma yang dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2009. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud mencakup penulisan menggunakan bahasa asing dan daerah, kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, dan struktur yang dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Peraturan mengeni Kebahasaan

Peraturan mengenai kebahasaan dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 36

   Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, terutama

   A. Pasal 30

      Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah.

   B. Pasala 31 ayat (1 dan 2)

      (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebutdan/atau bahasa Inggris.

C. Pasal 33 ayat (1 dan 2)

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

D. Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

E. Pasal 36 ayat (3)

Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia".

F. Pasal 38 ayat (1)

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi yang merupakan pelayanan umum.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Beberapa butir dalam peraturan tersebut, yaitu yang berikaitan dengan penggunaan bahasa negara di badan publik dijadikan butir pertanyaan dalam angket.

1.6.2 Badan Publik

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggaran kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggaran kegiatannya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri.

Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

1.6.3 Penggunaan Bahasa

A. Ejaan

Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya.

Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dankeseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan

bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ejaan ibarat merupakan rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika pengemudi mematuhi rambu lalu lintas itu, terciptalah lalu lintas yang tertib, teratur, dan tidak semrawut. Seperti itulah bentuk hubungan antara pemakai bahasa dan ejaan (Finoza, 2001:13).

Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan Ejaan yang Disempurnakan (EYD). EYD yang resmi mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972 merupakan upaya penyempurnaan ejaan yang sudah dipakai selama 25 tahun sebelumnya yang dikenal dengan nama Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi. Sebelum Ejaan Soewandi, telah ada ejaan yang merupakan ejaan pertama bahasa Indonesia, yaitu Ejaan Van Ophuysen.

1. Ruang lingkup Ejaan yang Disempurnakan (EYD) mencakup lima aspek, yaitu (1) pemakaian huruf, (2) penulisan huruf, (3) penulisan kata, (4) penulisan unsur serapan, dan (5) pemakaian tanda baca (Finoza, 2001:15).
2. Pemakain huruf membicarakan bagian-bagian dasar dari suatu bahasa, yaitu abjad, vokal, konsonan, pemenggalan, dan nama diri.
3. Pemakaian huruf membicarakan beberapa perubahan huruf dari ejaan yang sebelumnya, meliputi huruf kapital dan huruf miring.
4. Penulisan kata membicarakan bidang morfologi dengan segala bentuk dan jenisnya, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari, kata sandang si dan sang, pertikel, singkatan dan akronim, angka dan lambing bilangan.
5. Penulisan unsur serapan membicarakan kaidah cara penulisan unsur serapan, terutama kosakata yang berasal dari bahasa asing.
6. Pemakaian tanda baca membicarakan teknik penerapan kelima belas tanda baca dalam penulisan dengan kaidahnya masing-masing.

B. Diksi (Pilihan Kata)

Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Setiap penulis atau pembicara harus

berusaha secermat mungkin memilih kata-kata untuk mencapai maksud tertentu. Kata yang dipakai oleh penulis atau pembicara dikatakan sudah tepat apabila ada reaksi selanjutnya, baik berupa aksi verbal maupun nonverbal dari pembaca atau pendengar. Selain itu, ketepatan juga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara kedua pihak yang sedang berkomunikasi. Secara umum, persyaratan pilihan kata, meliputi (1) ketepatan, (2) kelaziman, (3) kecermatan (Keraf, 2002:88).

Beberapa butir perhatian dan persoalan berikut ini hendaknya diperhatikan setiap orang agar bisa mencapai ketepatan pilihan kata, yaitu:

1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi
2. Membedakan secara cermat kata-kata yang hampir bersinonim
3. Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya
4. Menghindari kata-kata ciptaan sendiri
5. Waspada terhadap penggunaan akhiran asing
6. Membedakan kata umum dan kata khusus

C. Unsur Asing dalam Bahasa Indonesia

Penggunaan unsur-unsur asing dalam bahasa Indonesia, baik dalam wacana atau kalimat sangat berkaitan dengan sikap bahasa. Sikap bahasa seperti itu merupakan sikap bahasa yang kurang positif, kurang bangga terhadap bahasa Indonesia, dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak mengurangi nilai kebakuan bahasa Indonesia yang digunakan, unsur-unsur bahasa asing tidak perlu digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan itu ialah dengan mencarikan padanannya dalam bahasa Indonesia atau menyerap unsur asing itu sesuai dengan kaidah yang berlaku, seperti yang diatur dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Kata-kata dalam bahasa Inggris yang telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia tidak perlu digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kata-kata berikut ini.

workshop	'sanggar kerja'
upgrading	'penataran'
approach	'pendekatan'
misunderstanding	'salah pengertian'
problem solving	'pemecahan masalah'
job-description	'uraian tugas'

Unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia harus memertajam daya ungkap bahasa Indonesia dan harus memungkinkan orang menyatakan makna konsep atau gagasan secara tepat. Penyerapan unsur bahasa asing itu harus dilakukan dengan selektif, yaitu kata serapan yang dapat mengisi kerumpangan konsep dalam khazanah bahasa Indonesia. Di samping itu, kata tersebut memang diperlukan dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan pemerkayaan daya ungkap bahasa Indonesia mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia modern. Berikut ini beberapa contoh kata tentang hal itu, seperti kata *condominium* diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian ejaan menjadi *kondominium*. Demikian pula dengan penyerapan kata *konsesi, staf, golf, manajemen,* dan *dokumen*. Kata-kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui penyesuaian ejaan.

D. Struktur Frasa

Pola penyusunan frasa ada dua jenis, yaitu (1) inti atau induk terletak di kiri pewatas, yaitu kata yang di depan adalah kata yang diterangkan (D) dan kata yang menyertainya adalah kata yang menerangkan (M), (2) inti atau induk terletak di kanan pewatas, yaitu kata yang di depan adalah kata yang menerangkan (M) dan kata yang menyertainya adalah kata yang diterangkan (D) (Sugono, 1999).

Pola penyusunan frasa dalam bahasa Indonesia mengikuti pola "diterangkan-menerangkan" (D-M), kecuali pada nama yang menjadi satu kata, seperti adikarya, artagraha, swakarsa, dan sebagainya. Hukum D-M memunyai pengecualian antara lain, kata depan, kata bilangan, kata keterangan, kata kerja bantu, kata majemuk dari bahasa asing.

1.6.4 Sikap Bahasa

Penelitian ini bertolak dari pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang dan sikap pengusaha/pelaku bisnia. Data penelitian berupa foto-foto media promosi dan papan nama serta jawaban responden atas pertanyaan dan pernyataan pertanyaan yang diajukan melalui angket/kuisioner. Dengan kata lain, objek penelitian ini adalah jawaban dan tanggapan yang berisikan pengetahuan dan sikap responden (pengusaha/pelaku bisnis) terhadap bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing.

Sikap bahasa (*language attitude*) dibentuk dari kata *sikap* dan *bahasa.Sikap* adalah 'perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan'. Selanjutnya, *bahasa* diberi arti 'sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.' (KBBI, 2005).

Hal yang mendukung KBBI diungkapkan oleh Secord dan Backman (1964) yang menyatakan bahwa *sikap* merupakan sesuatu ketepatan tentang perasaan, pikiran, dan sifat seorang individu untuk berperilaku terhadap suatu aspek situasi. Para ahli bahasa berpendapat bahwa sikap melibatkan satu sistem penilaian yang positif dan negatif, baik atau buruk, yang berhubungan dengan objek sosial.

Menurut Chaer dan Leonie Agustina (2010:149), sikap itu adalah fenomena kejiwaan, yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan dan perilaku. Namun, menurut banyak penelitian tidak selalu yang terdapat dalam batin keluar dalam bentuk perilaku yang sama dengan yang ada dalam batin. Banyak faktor yang memengaruhi hubungan sikap batin dan perilaku lahir.Menurut kebiasaan jika tidak ada faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi, sikap yang ada dalam batin itu dapat diduga dari tindakan atau perilaku lahir.

Sikap bahasa sebagai sebuah istilah adalah perilaku, gerak-gerik, dan perbuatan berlandaskan pendirian, pandangan, pendapat, dan keyakinan. Bahasa, baik bahasa daerah, bahasa nasional maupun bahasa asing, adalah alat komunikasi yang digunakan oleh penutur ataupun pemakai bahasa untuk mengutarakan

kehendak, maksud, atau harapan agar dapat bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi, sikap bahasa adalah suatu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain (Ridwan, 2006:211).

Sikap bahasa merupakan tata keyakinan yang berhubungan dengan bahasa yang berlangung relatif lama, tentang suatu objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu yang disukainya (Anderson, 1974). Sikap terhadap suatu bahasa dapat pula dilihat dari bagaimana keyakinan penutur terhadap suatu bahasa; bagaimana perasaan penutur terhadap bahasa itu; bagaimana kecenderungan bertindak tutur terhadap suatu bahasa. Dalam buku.

1.6.5 Unsur-Unsur Sikap Bahasa

Sikap terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur kognitif, afektif, dan konatif (psikomotorik). Unsur kognitif menyangkut masalah pengetahuan alam sekitar dan gagasan, yang kategorinya dipergunakan dalam proses berpikir. Unsur afektif berhubungan dengan masalah penilaian baik, suka atau tidak suka, terhadap suatu situasi. Apabila seseorang mempunyai rasa baik atau senang pada suatu situasi, Orang tersebut dapat dikatakan mempunyai *sikap positif,* dan sebaliknya memiliki *sikap negatif.* Unsur konatif berhubungan dengan perilaku atau perbuatan seseorang dalam mengambil keputusan terakhir terhadap suatu keadaan.Perlu diperhatikan karena sikap dapat itu dapat positif atau negatif, sikap terhadap bahasa pun demikian (Lambert, 1976 dalam Chaer, 2004).

Selanjutnya, Halim (1983:156) yang mengutip pendapat Garvin dan Mathiot, mengatakan bahwa sikap bahasa setidak-tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu

(1) sikap kesetiaan, yang mendorong suatu masyarakat bahasa mempertahankan bahasanya dan jika perlu mencegah adanya pengaruh asing,

(2) sikap kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat,

(3) sikap kesadaran akan adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang

sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan penggunaan bahasa.

Ketiga ciri yang dikemukakan tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa.Apabila ketiga ciri bahasa tersebut melemah atau sudah menghilang dari diri seseorang atau dari suatu komunitas, berarti telah terjadi sikap negatif terhadap bahasa tersebut.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa pendekatan terhadap sikap bahasa dapat dilakukan melalui psikologi sosial karena bahasa berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam hubungan sosialnya yang mencakup keadaan mental manusia, baik positif, netral, maupun negatif terhadap bahasa.

Fasold (dalam Ridwan, 2006:215) berpendapat bahwa penutur atau pemakai bahasa dapat mengevaluasisuatu bahasa mempunyai ciri berikut: kaya, miskin, indah, jelas, lemah lembut, dan sebagainya berlandaskan pendapat dan rasa bahasanya. Selanjutnya, Fasold juga berpendapat bahwa sikap merupakan gejala mental yang menggambarkan keadaan individual.

Berdasarkan pandangan Fasold di atas, terdapat kaidah sikap bahasa, yaitu sebagai berikut.

(1) Sikap yakin, merupakan motivasi kuat dalam pembinaan dan peningkatan kemampuan bahasa.

(2) Sikap liberal, merupakan sikap terlalu terbuka tanpa batasan. Sikap seperti ini membahayakan kebanggaan atas bahasa sendiri dan terlalu mengagungkan bahasa lain. Misalnya, dalam hal penyerapan unsur bahasa asing tanpa berusaha terlebih dulu mencari dari khazanah bahasa sendiri.

(3) Sikap menurut bimbingan, merupakan sikap positif terhadap kaidah atau aturan kebahasaan. Sikap ini mengarah kepada kecendekiaan dan kearifan berbahasa.

(4) Sikap acuh tak acuh, merupakan sikap berbahasa seenaknya tanpa terlalu memperhitungkan akibat psikologis atau sosial.

Dittmar mengemukakan bahwa pengertian sikap bahasa ditandai oleh sejumlah ciri yang antara lain meliputi pemilihan bahasa dalam masyarakat

multilingual, distribusi perbendaharaan bahasa, perbedaan-perbedaan dialektikal, dan problema yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara individu (lihat Suwito: 1982:58)

Menurut Sugiyono dan Sasangka (2011:40), ada empat fungsi sikap bagi individu, yaitu sebagai berikut.Pertama, sikap berfungsi instrumental yang ditunjukkan oleh sikap positif atau sikap negatif individu. Sikap positif individu terhadap individu ialah membantu atau menguntungkan individu, sedangkan sikap negatif atau sikap tidak suka individu terhadap objek ialah menghalangi atau menghukum individu. Kedua, sikap berfungsi sebagai pengetahuan karena sikap merupakan pengetahuan individu terhadap lingkungan yang berarti terstruktur. Ketiga, sikap berfungsi untuk mengungkapkan nilai dasar yang dimiliki seseorang dan berfungsi untuk meningkatkan citra diri. Keempat, sikap berfungsi untuk melindungi individu dari pikiran dan perasaan yang mengancam citra diri atau penilaian mereka.

1.7 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif. Metode deskriptif dikhususkan untuk analisis penggunaan bahasa Indonesia di Badan Publik sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk sikap bahasa pegawai di Badan Publik.

1.7.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah kelompok subjek yang harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama yang membedakannya dengan kelompok subjek lain. Populasi penelitian ini adalah pegawai Badan Publik di Kabupaten Lombok Barat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam penelitian bahasa, sampel yang besar tidak diperlukan karena perilaku linguistik cenderung lebih homogen dibandingkan perilaku-perilaku lainnya (Mahsun, 2005:210). Ahsen (dalam Mahsun, 2005:210) menyebutkan bahwa penelitian sosiolinguistik yang hasilnya telah diterbitkan ternyata menggunakan sampel dalam jumlah yang tidak besar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

berjumlah **empat puluh (40)** orang dari populasi yang mewakili pegawai dari **dua puluh (20)** badan publik di Kabupaten Lombok Barat. Guna menentukan subjek yang akan diwawancarai digunakan kreteria sebagai berikut.

a. Pegawai badan publik di daerah yang telah dijadikan sebagai objek penelitian.
b. Berjenis kelamin pria atau wanita.
c. Berusia 18-65 tahun.
d. Berpendidikan minimal sekolah dasar.
e. Dapat berbahasa Indonesia.
f. Sehat jasmani (tidak cacat organ bicaranya) dan rohani (tidak gila).

Variabel utama penelitian ini adalah sikap bahasa dan variabel pengamatan yang meliputi (1) usia (menghasilkan data ordinal), (2) pendidikan, (3) jenis kelamin (menghasilkan data nominal), (4) bahasa pertama, (5) bahasa yang paling dikuasi selain bahasa pertama, (6) identitas kependudukan, dan (7) Frekuensi bepergian ke luar daerah.

Topik penggunaan bahasa Indonesia di badan publik ditentukan berdasarkan jumlah variabel yang ada, yaitu penggunaan bahasa di badan publik. Data untuk analisis penggunaan bahasa Indonesia di badan publik terbagai menjadi kategori papan nama, petunjuk umum, poster, dan spanduk. Data tersebut relatif lebih mudah didapatkan dan untuk mendapatkan variasi jenis kesalahan berbahasa maka jumlah sampelnya sama untuk masing-masing kategori. Jumlah sampel adalah 80 sampel penggunaan bahasa di badan publik terbagi menjadi empat jenis media, yaitu papan nama, petunjuk umum, poster, dan spanduk. Masing-masing berjumlah 20 sampel berupa foto.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data sikap bahasa pegawai badan publik di Kabupaten Lombok Barat dan data survey penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan badan publik. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan menggunakan metode yang berbeda. Data pertama dikumpulkan

menggunakan metode wawancara (Mahsun, 2005) dan data kedua dikumpulkan menggunakan metode survei. Kedua metode tersebut dijabarkan secara berurutan sebagai berikut.

1.7.2.1 Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data sikap bahasa pegawai badan publik melalui percakapan antara peneliti dengan sampel penelitian (Mahsun, 2005). Data untuk analisis penggunaan bahasa Indonesia di badan publik terbagai menjadi kategori papan nama, petunjuk umum, poster, dan spanduk. Daftar tanyaan dalam instrumen tersebut berbentuk tertutup sehingga peneliti bertugas menjelaskan maksud masing-masing pertanyaan dan bagaimana cara pengisian instrumen tersebut. Teknik dasar yang dipakai adalah teknik cakap semuka, yaitu peneliti langsung mendatangi setiap lokasi pengamatan dan melakukan percakapan dengan informan. Teknik catat juga digunakan ketika sedang menerapkan teknik tersebut.

Teknik catat merupkan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara guna mencatat pernyataan-pernyatan penting yang diperoleh dari sampel penelitian. Dengan demikian, data untuk fokus kajian sikap bahasa dikumpulkan menggunakan metode wawancara yang dibantu oleh instrumen penelitian. Peneliti mendatangi sampel pada setiap lokasi yang telah ditentukan dengan mencatat berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Daftar pertanyaan yang digunakan terdiri atas kesetian bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran bahasa terhadap norma yang ada.

1.7.2.2 Survei

Survei merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk melihat dan mangamati suatu objek. Sebuah survei dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya sebuah objek dan tidak dapat mengontrol variabel yang lain yang mungkin berpengaruh seperti tingkat sosial atau pengetahuan. Dengan demikian, sebuah survei tidak dapat memberikan jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan, tetapi memberikan gambaran akan suatu objek (Dowdy dkk., 2004: 19). Dalam

hal ini, objek yang ingin disurvei adalah penggunaan bahasa Indonesia di badan publik dalam bentuk tulisan yang tertera pada papan nama, petunjuk umum, poster, dan spanduk. Data yang diperoleh melalui survei ini merupakan data awal yang nantinya akan diolah menggunakan metode tersendiri.

1.7.3 Indikator Sikap Bahasa, Klasifikasi dan Perhitungan Indeks

Seseorang dianggap bersifat positif terhadap sebuah bahasa apabila orang itu mempunyai kemampuan yang baik terhadap bahasa itu, mempunyai impresi yang baik, masih menggunakan bahasa itu dalam berbagai ranah, dan mampu menurunkan penggunaan bahasa itu kepada generasi di bawahnya (Sugiyono dan Sasangka, 2011:68).

Angket yang didistribusikan terdiri atas (1) profil responden dengan 7 pertanyaan tertutup yang dilanjutkan dengan (2) pengetahuan tentang peraturan kebahasaa yang terdiri atas 8 pertanyaan. Responden diharapakan menajawab dengan pertanyaan dengan jawaban *ya* atau *tidak*). Jika menjawab *ya*, jawaban dikonversi ke dalam 4 nilai bobot (2, 3, 4, dan 5). Jawaban yang benar dan lengkap diberi bobot 5, jawaban yang benar, tetapi kurang lengkap diberi nilai 4, nilai 3 diberikan untuk responden yang menjawab ya, tetapi jawaban yang diberikan tidak tepat, dan nilai 2 diberikan kepada responden yang menjawab ya, tetapi tidak memberikan komenter mengenai isi perundang-undangan (jawaban untuk isi perundang-undangan kosong). Responden yang menjawab *tidak* diberi nilai 1.

Bagian ketiga angket adalah pernyataan yang terkait dengan sikap bahasa. Ada 32 pernyataan yang merupakan penjabaran dari dua belas indikator sikap. Masing-masing indikator terdiri atas dua pernyataan. Dimensi dan indikator sikap bahasa dapat dilihat pada Tebel berikut.

Tabel 1: Dimensi dan Indikator Sikap Bahasa

Variabel	Dimensi	Indikator
Sikap	Kesetiaan Bahasa	1. Mempertahankan bahasa

Bahasa	(*Language Loyality*)	2. Mencegah adanya pengaruh bahasa lain 3. Menggunakan bahasa pada berbagai kesempatan 4. Menggunakan bahasanya dalam berbagai media 5. mengoleksi kesalahan panutur lain bahasa tersebut yang diikuti dengan membenarkan kesalahan yang terjadi 6. mengajarkan kepada generasi selanjutnya agar bahasa tersebut tidak punah 7. Bahasa dipelihara dengan cara digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari 8. Penggunaan bahasa secara teratur merupakan salah satu bentuk usaha mempertahankan bahasa
	Kebanggan Bahasa (*Language Pride*)	9. Mendorong orang mengembangkan bahasa 10. Menggunakan bahasa sebagai lambang identitas 11. Menggunakan bahasa sebagai pemersatu bangsa 12. Bertutur menggunakan bahasa yang disukainya 13. Menganggap bahasanya penting 14. Percaya bahwa bahasanya dapat eksis di era globalisasi

	Kesadaran Adanya Norma (*Awaresess of The Norm*)	15. Mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat 16. Mendorong orang menggunakan bahasa dengan santun

Responden dipersilahkan untuk menjawab salah satu dari lima buah opsi pilihan jawaban dengan bobot skala 5,4,3,2, dan 1. Pada opsi yang memiliki bobot 5 berarti sikap responden terhadap bahasa Indonesia semakin positif, sedangkan opsi yang mengandung bobot 1 berarti sikap responden terhadap bahasa Indonesia sangat negatif. Setiap satu butir angket memiliki opsi pilihan jawaban *sangat setuju* (SS), *setuju* (s), *ragu-ragu*(R), *tidak setuju* (TS), dan *sangat tidak setuju* (STS) yang masing-masing memiliki bobot 5,4,3,2, atau 1. Dari 32 tersebut ada beberapa pernyataan yang bersifat negatif. Jadi, dalam penilain, jawaban sangat setuju justru diberi nilai 1 dan jawaban tidak setuju justru diberi nilai 5. Pernyataan yang bersifat negatif tersebut bernomor 11, 12, 17, 18, 25, 26, 31, dan 32.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa responden yang memperoleh nilai angket dengan bobot yang tinggi mengindikasikan sikapnya terhadap bahasa Indonesia yang sangat positif. Sebaliknya, jika responden yang memperoleh nilai angket dengan bobot yang rendah, sikapnya terhadap bahasa Indonesia semakin negatif.

1.7.4 Metode Analisis Data

Kedua data yang diperoleh menggunakan dua metode di atas memiliki karakteristik tersendiri. Untuk itu, kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode yang berbeda. Data pertama akan dianalisis secara kuantitatif dan data kedua dianalisis menggunaka metode deskriptif analitik. Sebelum masuk pada penghitungan statistik menggunakan SPSS, data pertama dikonversi menggunakan skala Likert (Ravid, 2011). Nilai terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5. Skala yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Konversi Nilai Kualitatif

Nilai Kualitatif	Konversi
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

A. Metode Analisis Statistik

Uji statistik yang digunakan adalah uji t atau anava satu arah yang dilanjutkan dengan uji post hoc. Uji dilakukan untuk melihat signifikansi masing-masing yang mendukup sikap bahasa pegawai badan publik Kabupaten Lombok Barat. Derajat kebebasan yang digunakan adalah 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Untuk menentukan sikap positif dan negatif sampel terhadap bahasa Indonesia digunakan 5 kategori, yaitu sangat positif (SP), positif (P), cukup positif (CP), kurang positif (KP), dan tidak positif (TP). Interval kelas masing-masing kategori ditentukan melalui uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen penelitian sikap bahasa. Untuk melihat korelasi antarkomponen, data dianalisis menggunakan metode uji korelasi spearman (SPM).Untuk membandingkan sikap antar komponen digunakan uji perbandingan bifatriat.

B. Metode Analisis Deskriptif Analitik

Data kedua dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik (Ratna, 2004; 53). Ada lima (5) proses yang dilakukan. Kelima proses tersebut adalah (1) pengumpulan dan pengelompokan fakta-fakta temuan dari pengumpulan data, (2) analisis kesalahan berbahasa, (3) Analisis berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan, (4) pembuatan kesimpulan, dan (5) pembuatan rekomendasi.

Pengelompokan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data yang telah dikumpulkan. Data foto diklasifikasikan berdasarkan fenomena yang ditemukan.

1.7.5 Instrumen

Alat untuk keperluan pengumpulan data sikap bahasa dan penggunaan bahasa di badan publik berupa instrumen. Kedua data tersebut memiliki karakterisitik berbeda sehingga alat yang digunakan juga berbeda. Data pertama dikumpulkan menggunakan isntrumen yang terdiri atas daftar pernyataan yang terbagi menjadi tiga subvariabel, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran bahasa terdapat norma yang ada. Jenis pernyataan yang digunakan menggunakan metode tertutup. Sampel dalam penelitian ini diberikan penjelasan mengenai maksud pernyataan tersebut dan diberikan kesempatan untuk memilih satu dari lima pilihan yang telah disediakan. Pilihan yang dimaksud adalah sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Nilai terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5. Jawaban dalam instrumen cukup dicentang pada kolom yang telah disediakan.Daftar pernyataan dan instrumen terdapat dalam lampiran proposal ini.

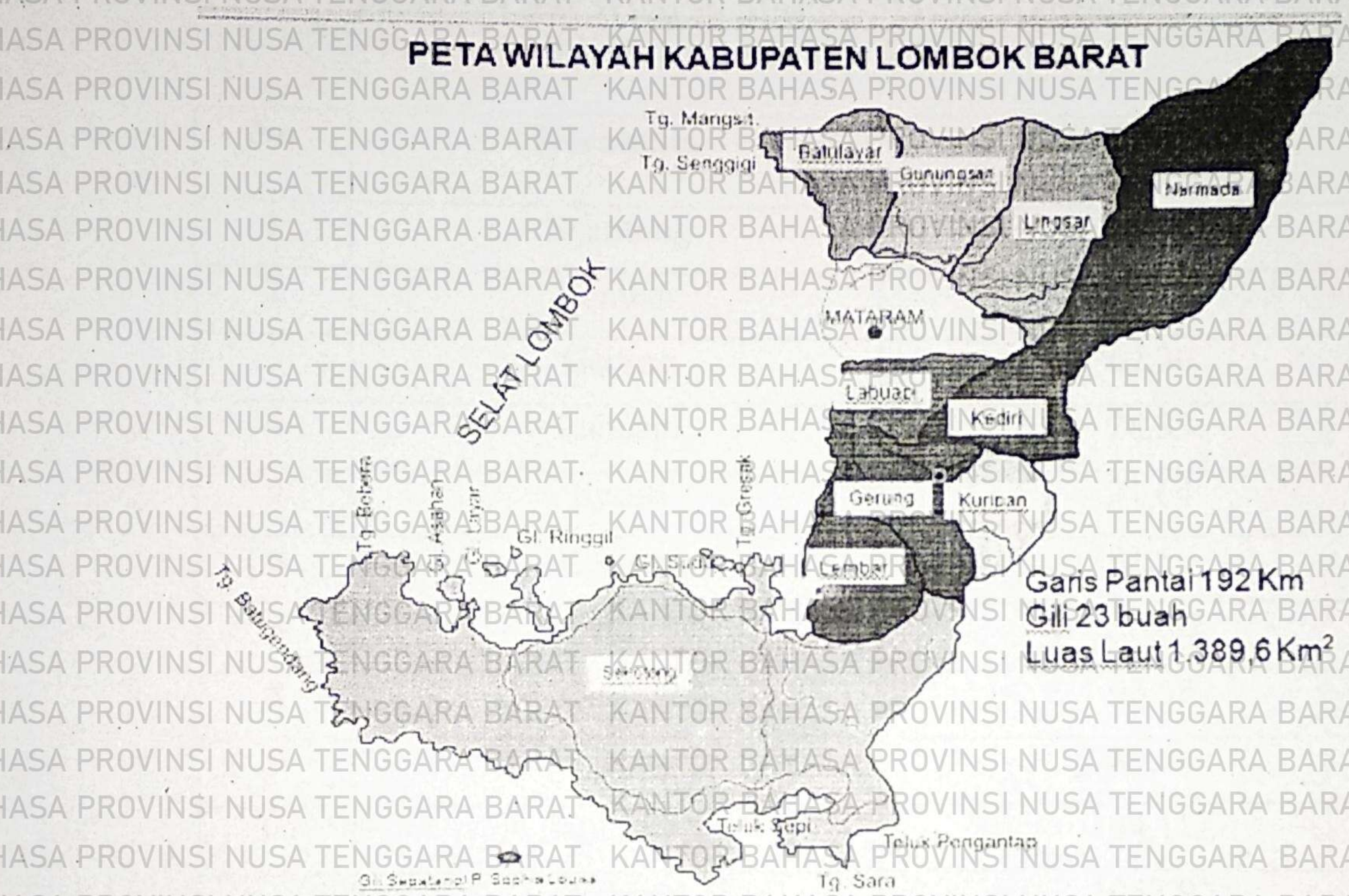
Data kedua, penggunaan bahasa di media luar ruang, dikumpulkan menggunakan daftar isian survei. Daftar isian survei terdiri atas jenis data dan jenis kesalahan berbahasa yang ditemukan. Data penggunaannya dikumpulkan menggunakan kamera sehingga dapat dikumpulkan, dikelompokkan, diklasifikasikan, dan dianalisis. Daftar isian survei terdapat dalam lampiran proposal penelitian ini.

1.7.7 Penyajian Analisis Data

Hasil dalam penelitian ini disampaikan dalam dua subab, yaitu sikap bahasa dan penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik. Subbab pertama disampaikan menggunakan tabel hitung atau bagan dan deskripsi. Subbab kedua disampaikan dalam bentuk persentase dan analisis kualitatif kesalahan penggunaan bahasa bagi badan publik.

BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

PETA WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT



Pada penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu penelitian ini juga memberikan batasan atas wilayah Kecamatan yang dipilih, wilayah tersebut adalah Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Gerung.

Secara geografis, Kabupaten Lombok Barat berada di 115° 49,12' 04" – 116° 20' 15,62" Bujur Timur dan 8° 24' 33,82" – 8° 55'19" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1.053,92 Km^2. Sebelah Utaranya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan sebelah Selatannya berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat sebesar 1053,92 Km^2 yang terbagi menjadi sepuluh Kecamatan yaitu Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, Narmada, Lingsar, Gunungsari, dan Batu Layar.

Tabel 3: Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamata	Luas Wilayah (Km^2)
1	Sekotong	529,38
2	Lembar	62,66
3	Gerung	62,30
4	Labuapi	28,33
5	Kediri	21,64
6	Kuripan	21,56
7	Narmada	107,62
8	Lingsar	96,58
9	Gunungsari	89,74
10	Batu Layar	34,11
	Jumlah	1053,92

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 Kabupaten Lombok Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 665.132 jiwa. Terdiri dari 325.213 laki-laki dan 339.919 perempuan.

Tabel 4: Jumlah penduduk di tiap Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan	Penduduk
1	Sekotong	68451
2	Lembar	49240
3	Gerung	81522

4	Labuapi	65331
5	Kediri	57315
6	Kuripan	37252
7	Narmada	92512
8	Lingsar	68459
9	Gunungsari	91037
10	Batu Layar	54013
	Jumlah	665132

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat

2.1 Sejarah

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu *Onder Afdeling* dibawah *Afdeling Lombok* yakni *Onder Afdeling van west Lombok* yang dipimpin oleh seorang *Controleur*. Onder Afdeling menurut hierarki kelembagaan sama dengan *Regenschap* (Kabupaten).

Selanjutnya pada zaman Pemerintah Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi daerah administratif yang disebut *Bun Ken* yang dikepalai oleh seorang *Bun Ken Kanrikan.* Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda (NICA).

Dibawah Pemerintah NICA, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan *Neo Landschappen* termasuk didalamnya semua bekas Afdeling (Stb. No.15 th.1947). Di dalam wilayah *Neo Landschap Lombok*, wilayah Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang *Hoofdvan Plaatselijk Bestuur* sebagai perubahan nama dari *controleur*.

Namun sesudah Konferensi Meja Bundar dan berlangsung pemulihan kekuasaan Negara RI pada tanggal 27 Desember 1949, maka berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa Negara Bagian, diantaranya Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah NIT No. 44 Tahun 1950, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa

wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah bagian yang otonom. Namun dalam prakteknya, otonomi ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya karena tidak dipimpin oleh Kepala Daerah Bagian melainkan oleh seorang Kepala Pemerintahan setempat yang sifatnya administratif belaka. Pada masa ini Daerah Lombok Barat membawahi wilayah administratif kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dimana daerah Indonesia dibagi habis dalam daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III. Selanjutnya berdasarkan UU No.1 Tahun 1957, lahirlah UU No.64 dan 69 Tahun 1958 masing-masing tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Oleh karena itu secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Up. 7 / 14 / 34 diangkat J.B. Tuhumena Maspeitella sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk. II Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960 Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat membentuk DPRD yang berjumlah 34 kursi sekaligus memilih Lalu Djapa sebagai Ketua DPRD Lombok Barat dari unsur Partai Nasional Indonesia. Namun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahum 1959, jabatan Kepala Daerah merangkap menjadi Ketua DPRD, sehingga Ketua DPRD yang sudah dipilih ditetapkan menjadi Wakil Ketua.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 1960 dilantiklah Lalu Anggrat, BA sebagai Bupati Kepala

Daerah. Pada masa ini dilakukan perubahan berupa penataan personil dan aparat Pemerintah Daerah serta perubahan status Kepunggawaan Cakranegara menjadi Kedistrikan Cakranegara.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 205/ Des.1 / 1 / 35 tanggal 7 Mei 1965, Lalu Anggrat, BA mengakhiri masa bhaktinya dan sebagai penggantinya ditunjuk Drs. Said, Ahli Praja pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada saat ini berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 yang melakukan perubahan meliputi:

1. Sebutan Daerah Swatantra Tk. II berubah menjadi Kabupaten Daerah Tk. II.
2. Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap Ketua DPRD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1967 setelah terjadi G 30 S/PKI diadakan perombakan dan penyempurnaan DPRD menjadi DPRDGR (Gotong Royong) Lombok Barat dari 34 kursi menjadi 32 kursi, dengan Ketua yang baru yakni. Usman Tjipto Soeroso dari Golongan Karya dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol Nahdatul Ulama. Pada masa ini sesuai perkembangan pemerintahan dan kebutuhan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 228 /Pem. 20/1/12 diadakan perubahan yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri.

Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem. 7/2/226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1972 – 1978 Kabupaten Lombok Barat dipimpin Oleh H. L. Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah. Sampai dengan Tahun 1978 Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat telah mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga banyak menghadapi permasalahan yang serba komplek dan perlu ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram yang membawahi tiga Kecamatan masing-masing Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Sebagai Walikota Mataram pertama dilantiklah Drs. H. Mudjitahid oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H.R. Wasitakusumah sesaat setelah peresmian pembentukan Kota Administratif Mataram oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 29 Agustus 1978.

Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, PP No. 21 Tahun 1978 juga menetapkan tiga Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan.

Sehubungan berakhirnya masa jabatan H. L. A-Rachman, pada tanggal 20 Januari 1979 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. Gatot Suherman melantik Drs. H. Lalu Ratmadji dalam Sidang Khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat. Pada masa jabatan lima tahun pertama (1979–1984), Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Lombok Barat mengusulkan Tiga Perwakilan Kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 diresmikanlah peningkatan status Perwakilan Kecamatan Narmada menjadi Kecamatan Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri menjadi Kecamatan Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung menjadi Kecamatan Sekotong Tengah. Peresmian itu dilaksanakan setelah pelantikan Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk masa jabatan lima tahun kedua (1985-1989). Dengan diresmikannya ketiga

perwakilan menjadi Kecamatan penuh, maka Lombok Barat membawahi 12 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Gunungsari, Tanjung, Gangga, Bayan, Labuapi, Kediri, Gerung, Sekotong Tengah dan Narmada.

Selanjutnya dalam sidang khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 20 Januari 1989 Gubernur NTB Warsito melantik Drs. H. Lalu Mudjitahid menjadi Bupati Lombok Barat menggantikan Drs. H. Lalu Ratmadji yang telah berakhir masa jabatannya. Pada periode jabatan pertama Drs. H. Lalu Mudjitahid (1989 – 1994) wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan, dimana Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkannya Pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung dan Sekotong Tengah.

Setelah Drs. H. Lalu Mudjitahid mengakhiri Jabatan periode kedua (1994 – 1999) Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Drs. H. Iskandar untuk masa jabatan 1999 – 2004. Pada Tahun 2000 wilayah Kabupaten Lombok Barat terus dikembangkan dengan membentuk Kecamatan Pembantu masing-masing Kecamatan Pembantu Lingsar, Kecamatan Pembantu Lembar, Kecamatan Pembantu Kayangan, dan Kecamatan Pembantu Pemenang sehingga secara keseluruhan wilayah Lombok Barat terdiri atas 9 Kecamatan dan 4 Kecamatan Pembantu. Selanjutnya pada tahun 2001 keempat Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gunung Sari, Batu Layar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Pada masa jabatan periode pertama Drs. H. Iskandar, Ibukota Kabupaten Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang, Gerung, sesuai

dengan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/3638/PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Februari 2000.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU), maka Kabupaten Lombok Barat bagian Utara yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan adalah merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat masuk ke wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dilantik Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tanggal 30 Desember 2008, secara administrasi pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah resmi, sehingga Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya membawahi 15 Kecamatan, menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, 88 Desa dan 657 Dusun.

2.2 Kehidupan Sosial dan Budaya

Masyarakat Kabupaten Lombok Barat terdiri dari beberapa suku baik namun suku yang terbesar yang mendiami wilayah ini adalah suku Sasak meskipun terdapat juga suku-suku lain seperti suku Samawa, Mbojo, Bali, Jawa. Adapun agama yang dianut kebanyakan penduduk Kabupaten Lombok Barat adalah agama Islam, terdapat juga agama lainya seperti agama Hindu, Budha, Katholik, dan Protestan. Untuk perkerjaan penduduk Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berprofesi sebagai petani, sisanya pegawai negeri, pedagang, nelayan, dan peternak.

Penduduk Kabupaten Lombok Barat memiliki keunikan tersendiri dalam rumah adat yang mereka buat. Dimana rumah adat tersebut lantainya terbuat dari campuran tanah liat, kotoran kerbau, dan kulit padi. Selain itu daerah ini juga terkenal dengan kesenian tradisionalnya yang bernama gendang beleq yang dimainkan saat pesta-pesta tertentu. Tradisi lain yang juga terkenal yaitu tradisi

perkawinan yang dinamakan merariq. Dimana pada tradisi perkawinan tersebut pengantin wanitanya diculik dari rumah orangtuanya terlebih dahulu.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari badan publik yang berada di kabupaten Lombok Barat dengan jumlah responden empat puluh (40) orang. Mereka diwawancarai menggunakan daftar tanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri atas dua jenis, yaitu daftar untuk pengumpulan data foto penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik dan kuesioner untuk mengetahui aspek kognitif dan afektif pengguna bahasa Indonesia bagi badan publik. Jenis kuesioner kedua terbagi menjadi tiga (3) bagian penting: ciri responden, aspek kognitif, dan aspek afektif.

Ciri responden terdiri atas delapan tanyaan mengenai responden termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, bahasa pertama, bahasa yang dikuasai, identitas kependudukan, dan mobilitas. Aspek kognitif terdiri atas delapan (8) tanyaan mengenai peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik.

Aspek afektif terdiri atas 32 tanyaan mengenai sikap pengguna terhadap bahasa Indonesia pada badan publik. Tanyaan untuk aspek kognitif dan afektif menggunakan skala Likert 1—5 dan terdiri atas dua jenis tanyaan, tanyaan positif dan negatif. Adapun jumlah tanyaan negatif adalah tujuh (7) tanyaan yang ditempatkan acak dalam kuesioner. Tanyaan negatif yang dimaksud adalah tanyaan nomor 12, 16, 17, 23, 24, 25, dan 26.

Pilihan jawaban responden dalam kuesioner untuk dua aspek sikap bahasa dikonversi menggunakan skala Likert 1—5. Nilai konversi untuk kedua tanyaan jenis tanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5: Konversi Niilai Tanyaan Positif

Nilai Kualitatif	Konversi
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3

Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Tabel 6: Konversi Nilai Tanyaan Negatif

Nilai Kualitatif	Konversi
Sangat Setuju	1
Setuju	2
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	5

Data yang telah dikonversi kemudian diolah menggunakan SPSS. Pengolahan data menggunakan uji t atau anava satu arah yang dilanjutkan dengan uji post hoc. Uji dilakukan untuk melihat signifikansi masing-masing yang mencakup sikap bahasa pegawai di badan publik di Kabupaten Lombok Barat. Derajat kebebasan yang digunakan adalah 0,05 dengan taraf kepercayaan 95%. Untuk menentukan sikap positif dan negatif sampel terhadap bahasa Indonesia digunakan 5 kategori, yaitu sangat positif (SP), positif (P), cukup positif (CP), kurang positif (KP), dan tidak positif (TP). Interval kelas masing-masing kategori ditentukan melalui uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen penelitian sikap bahasa. Untuk melihat korelasi antarkomponen, data dianalisis menggunakan metode uji korelasi spearman (SPM). Untuk membandingkan sikap antar komponen digunakan uji perbandingan bifatriat.

Adapun derajat penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik diwujudkan dalam rentang 0—1. Angka 0 menunjukkan tingkat penggunaaan paling rendah, sedangkan angka 1 menunjukkan tingkat penggunaan paling tingggi. Indeks yang digunakan adalah konversi skala Likert yang dimodifikasi dalam bentuk persentase atau pembagian biner. Konversi skala Likert dihitung dengan cara membagi rerata nilai dalam skala Likert dengan angka 5. Rentang

atau julat indeks sikap dan penggunaan bahasa itu direpresentasikan sebagai berikut.

Tabel 7: Derajat Sikap dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik

Derdajat Sikap dan Penggunaan Bahasa Indonesia	Arti
<0,2	Sangat Tidak Baik
0,2—0,4	Tidak Baik
0,41—0,6	Cukup Baik
0,61—0,8	Baik
0,86—1	Sangat Baik

Untuk mengetahui mengetahui tingkat kekuatan (keeratan) hubungan dua variabel digunakan uji korelasi Spearman (SPM). Kriteria tingkat kekuatan korelasi berpedoman pada nilai koefisien korelasi yang merupakan hasil *output* SPSS, dengan ketentuan sebagai berikut.

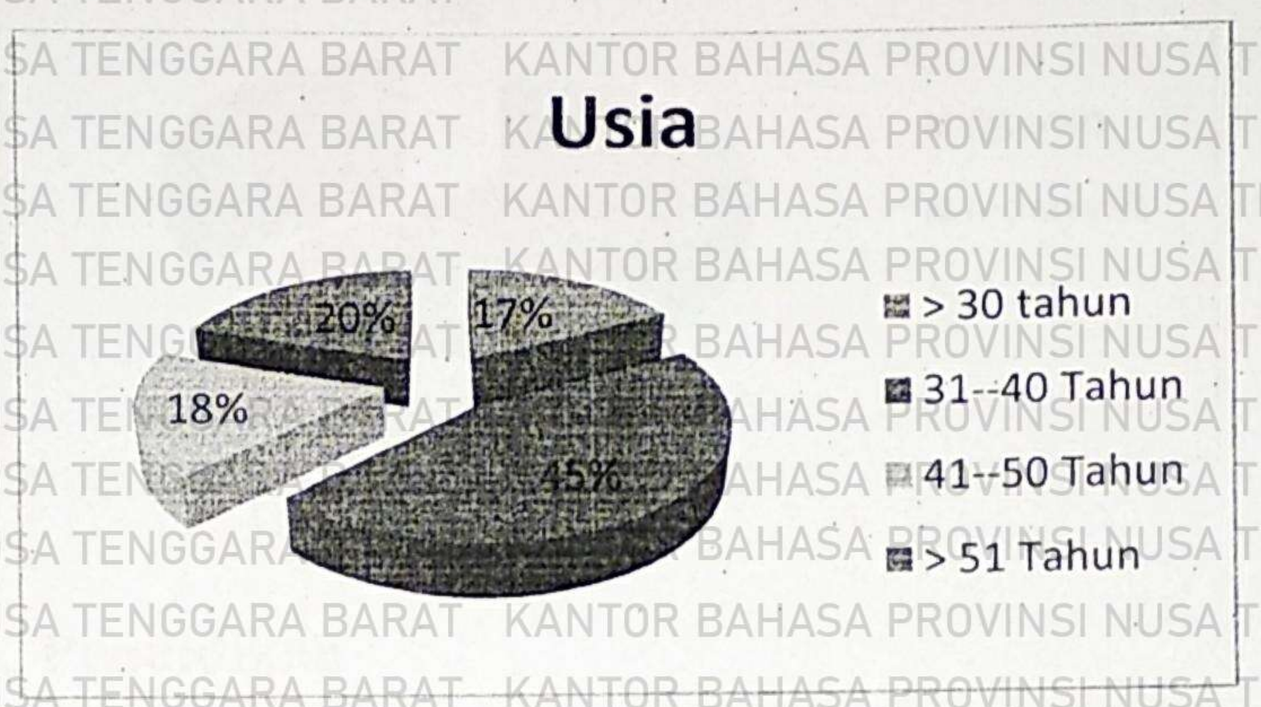
Tabel 7: Derajat Korelasi Sikap dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik

Derdajat Korelasi Sikap dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik	Arti
0,00—0,25	Sangat Lemah
0,26—0,50	Cukup
0,51—0,75	Kuat
0,76—0,99	Sangat Kuat
1,00	Sempurna

3.2 Ciri Responden Sikap Pengguna Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat

1. Usia

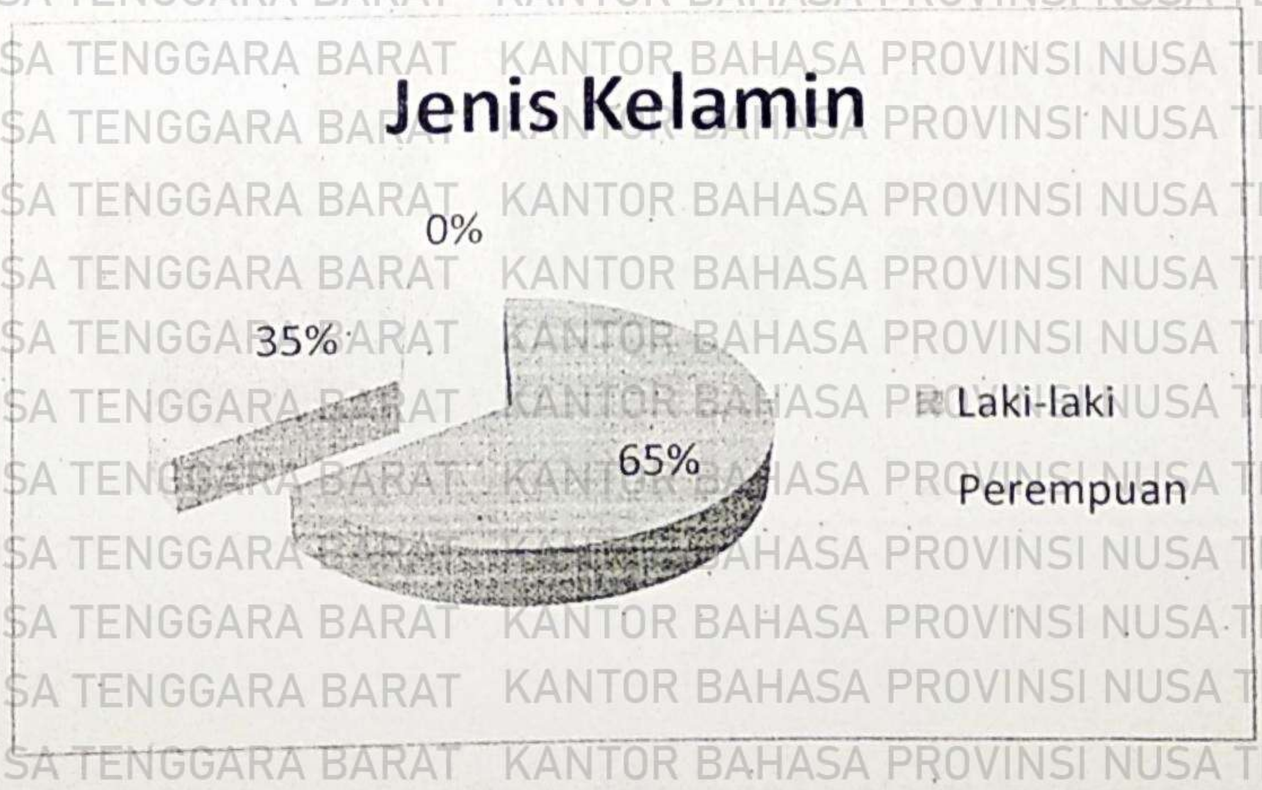
Dari 40 orang responden yang diambil dalam penelitian ini 17% berusia kurang dri 30 tahun, 45% berusia antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun, 18% berusia antara 41 tahun sampai dengan 50tahun, dan 20% berusia lebih dari 50 tahun.



2. Jenis Kelamin

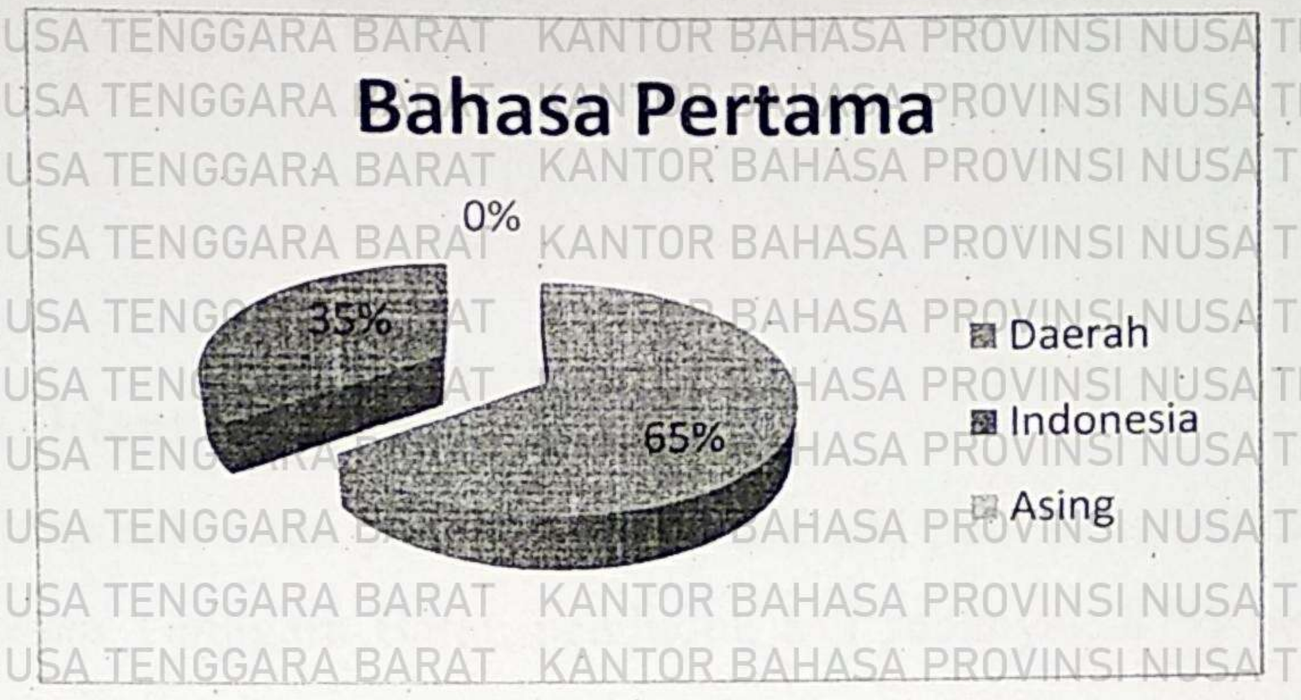
Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 40 orang.

Keseluruhan responden terbagi menjadi dua, 26 orang atau 65% berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang atau 35% berjenis kelamin perempuan.



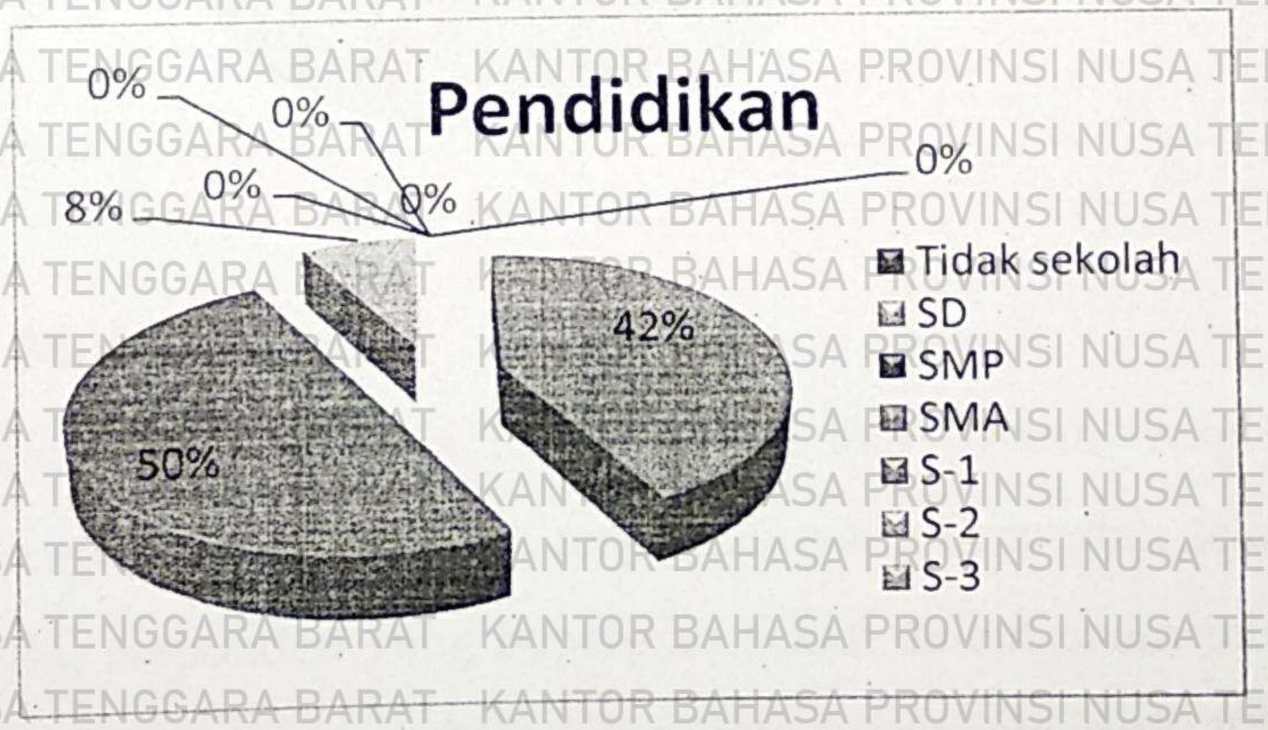
3. Bahasa Pertama

Bahasa pertama responden cukup bevariasi, 67% responden memiliki bahasa pertama bahasa Indonesia; hanya 33% responden memiliki bahasa pertama bahasa daerah, dan tidak ada responden yang memiliki bahasa pertama bahasa asing.



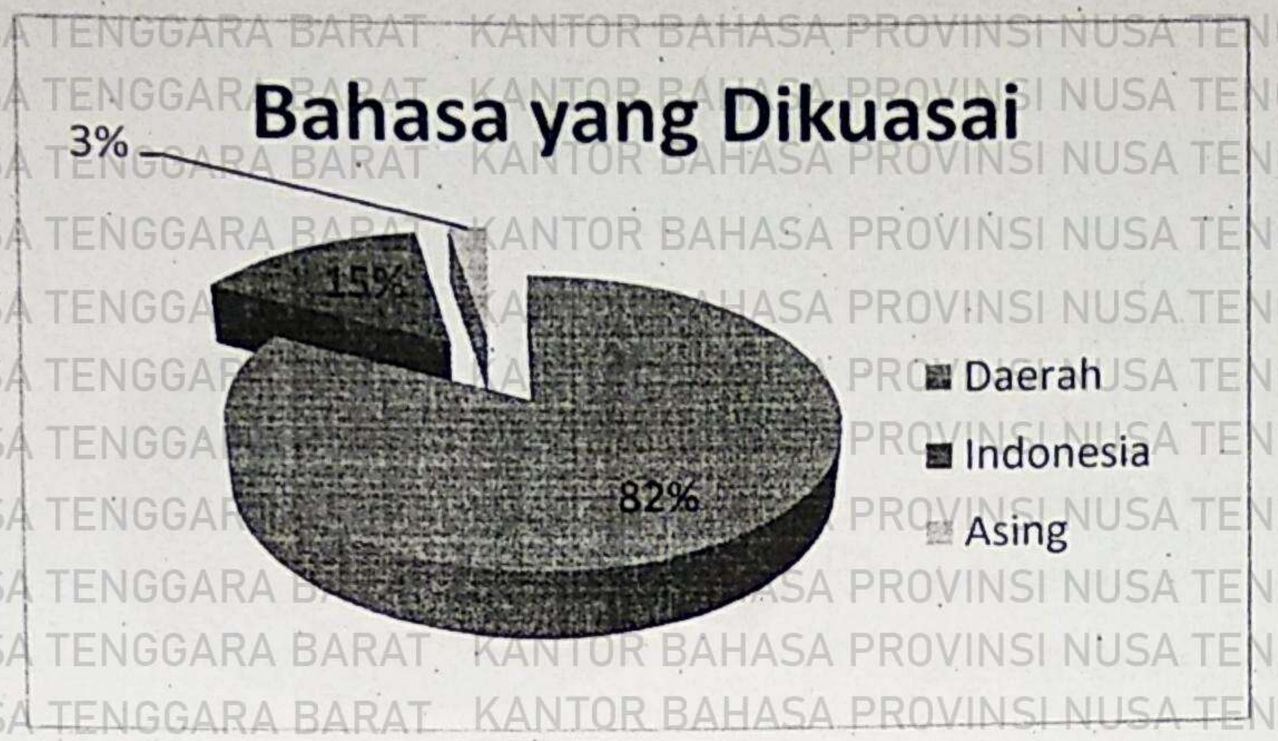
4. Pendidikan

Pendidikan responden terbagi menjadi tiga, yaitu 42% berpendidikan menengah atas (SMA); 50% berpendidikan tinggi strata satu (S-1); dan 8% berpendidikan strata dua (S-2)).



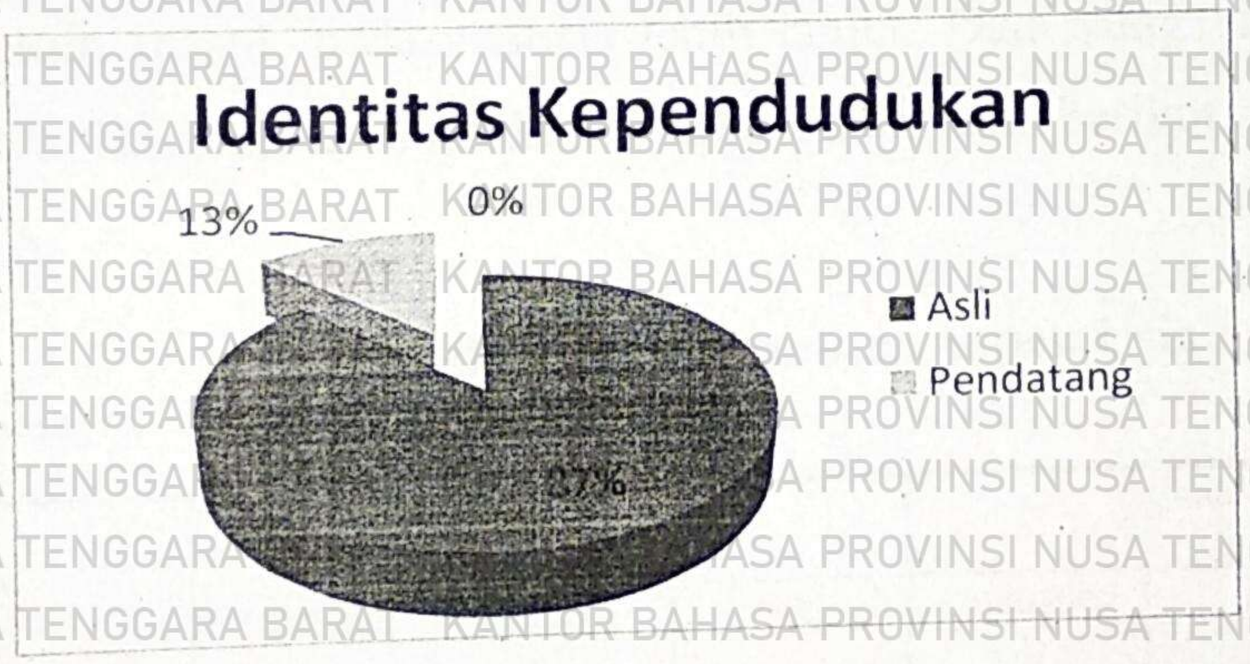
5. Bahasa yang paling dikuasai selain bahasa pertama

Selain bahasa pertama, responden menyatakan menguasai juga bahasa daerah (82%), bahasa Indonesia (15%), dan bahasa asing (3%).



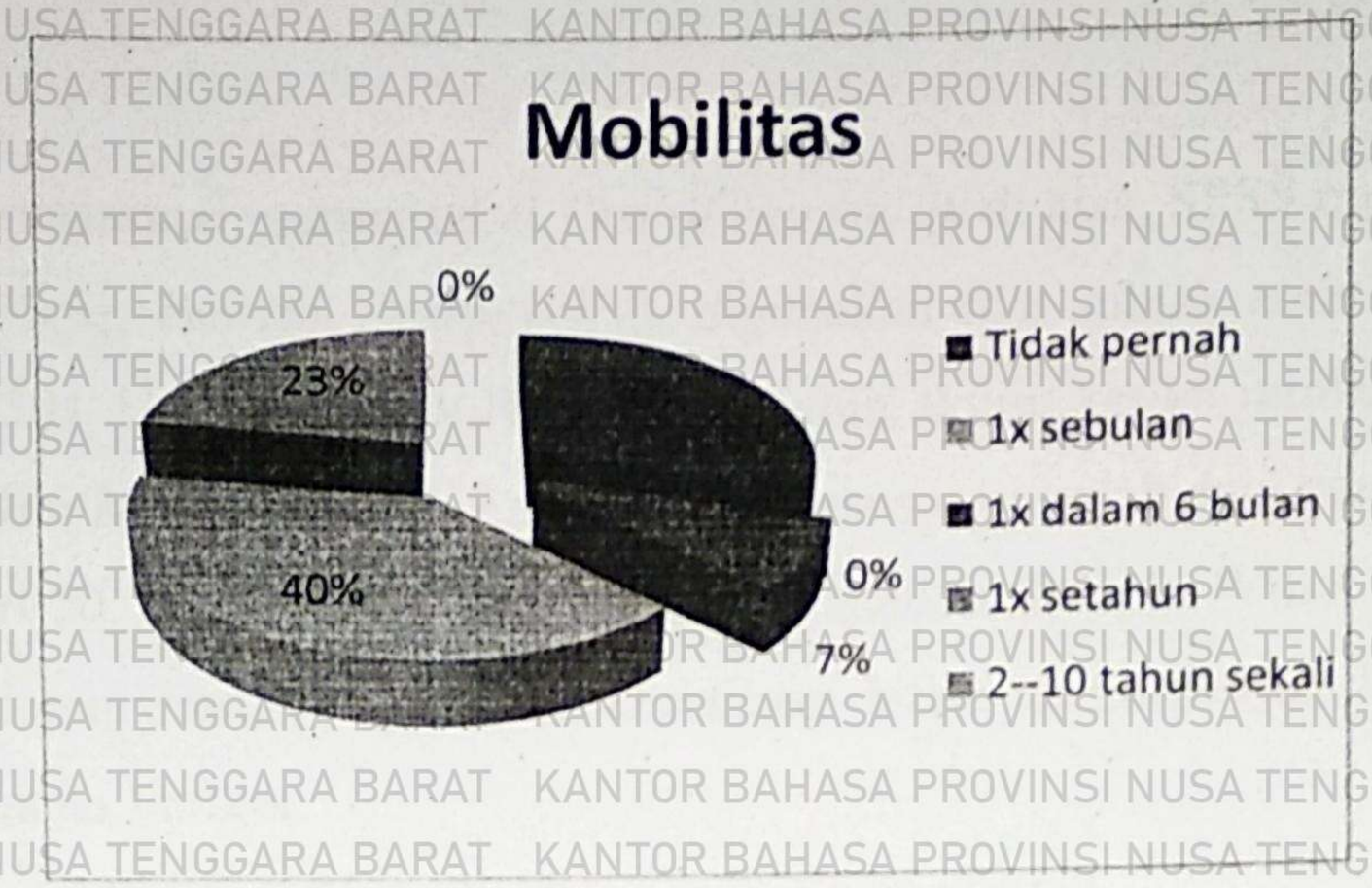
6. Identitas Kependudukan

Responden ada yang penduduk asli ada pula yang pendatang dari wilayah lain di Nusa Tenggara Barat, penduduk asli sebanyak 87% pendatang sebanyak 13%.



6. Mobilitas

Dilihat dari frekuensi bepergian ke luar daerah, responden yang tidak pernah bepergian sebanyak 30%, responden yang bepergian sekali dalam sebulan sebanyak 0%, responden yang bepergian sekali dalam enam bulan sebanyak 7%, responden yang bepergian sekali dalam satu tahun sebanyak 40%, dan responden yang bepergian dua sampai dengan sepuluh tahun sekali sebanyak 23%.



3.3 Sikap Pengguna Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat

3.3.1 Uji Normalitas

Sebelum masuk pada analisis lebih lanjut. Data yang telah diolah diuji normalitasnya. Hasil uji tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

1. USIA

Tabel 9: Uji Normalitas Aspek Usia

Tests of Normality

Usia		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
AspKog	1	.264	7	.150	.812	7	.054
	2	.202	18	.052	.854	18	.010
	3	.233	7	.200*	.854	7	.132
	4	.238	8	.200*	.897	8	.273
AspAfek	1	.194	7	.200*	.959	7	.813
	2	.124	18	.200*	.941	18	.302
	3	.255	7	.186	.833	7	.085
	4	.226	8	.200*	.963	8	.834

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan output tabel *Test of Normality* di atas, SPSS menyajikan dua tabel sekaligus, analisis Sharpio-Wilk digunakan jika subjek atau kasus kurang dari 50 (≤50). Uji Sharpio-Wilk dianggap lebih akurat ketika jumlah subjek/data yang dimiliki kurang dari 50. Karena pada kasus ini jumlah data yang dimiliki 40 kurang dari 50, maka yang digunakan adalah analisis Sharpio-Wilk.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Sharpio-Wilk, adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai Sig. > 0,05, maka data berdistribusi normal
b. Jika nilai Sig. < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas bedasarkan usia responden dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori pertama diberi angka 1 untuk responden yang berusia kurang dari 30 tahun, angka 2 untuk responden yang berusia antara 31 s.d. 40 tahun, angka 3 untuk informan yang berusia antara 41 s.d. 50 tahun, dan angka 4 untuk imforman yang berusia lebih dari 51 tahun. Hasil uji normalitas pada tabel 17 menunjukkan terdapat satu nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau <0,05 yaitu sebesar 0,010 pada aspek kognitif data responden yang berusia 31 s.d. 40. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan faktor usia data tidak berdistribusi secara normal.

2. PENDIDIKAN

Tabel 10: Uji Normalitas Aspek Pendidikan

Tests of Normality

Pendidikan		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AspKog	4	.218	17	.030	.859	17	.015
	5	.159	20	.200*	.928	20	.139
	6	.238	3	.	.976	3	.702

	4	.118	17	.200*	.962	17	.678
AspAfek	5	.139	20	.200*	.894	20	.032
	6	.232	3	.	.980	3	.726

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Uji normalitas berdasarkan tingkat pendidikan responden dikelompokkan menjadi lima tingkatan yang berbeda, yaitu: (1) tidak bersekolah, (2) SD (3) SMP, (4) SMA, (5) S-1, (6) S-2, dan (7) S-3. Berdasarkan tabel 24 di atas, dapat dilihat bahwa aspek kognitif, responden dengan pendidikan SMA yang ditunjukkan dengan angka 4 tingkat signifikansinya 0,01 < 0,05 terdistribusi tidak normal, sedangkan responden yang berpendidikan S-1 dan S-2 tingkat signifikansinya di atas > 0,05 terdistribusi normal.

Sementara itu, pada aspek afektif hanya responden yang berpendidikan S-1 saja yang tingkat signifikansinya < 0,05, yaitu 0,03 terdistribusi tidak normal, sedangkan responden yang berpendidikan SMA dan S-2 tingkat signifikansinya di atas > 0,05 terdistribusi normal.

3. JENIS KELAMIN

Tabel 11: Uji Normalitas Aspek Jenis Kelamin

Tests of Normality

Jenis Kelamin		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AspKog	1	.186	26	.021	.904	26	.019
	2	.226	14	.051	.924	14	.248
AspAfek	1	.129	26	.200*	.947	26	.199
	2	.161	14	.200*	.934	14	.346

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil uji normalitas berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa tingkat signifikansi aspek kognitif untuk laki-laki 0,01 berada di bawah (<) 0,05 sedangkan tingkat signifikansi aspek kognitif untuk wanita 0,24 berada di atas (>) 0,05. Sementara itu, tingkat signifikan aspek afektif untuk laki-laki maupun wanita semua berada di atas (>) 0,05 terdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan faktor jenis kelamin data tidak terdistribusi secara normal karena masih terdapat data yang tingkat signifikansinya > 0,05.

4. BAHASA PERTAMA

Tabel 12: Uji Normalitas Aspek Bahasa Pertama

Tests of Normality

Bhs Pertama		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AspKog	1	.199	27	.008	.890	27	.008
	2	.234	13	.051	.921	13	.255
AspAfek	1	.137	27	.200*	.953	27	.259
	2	.162	13	.200*	.937	13	.416

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Uji normalitas bedasarkan bahasa pertama responden dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori pertama diberi angka 1 untuk responden yang bahasa pertamanya menggunakan bahasa daerah, kategori kedua diberi angka 2 untuk responden yang menggunakan bahasa Indonesia, dan kategori ketiga diberi angka 3 untuk responden yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pertamanya.

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dilihat pada kolom df responden menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya sebanyak 27 orang, sedangkan 13 orang responden lainnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hampir semua data

terdistribusi normal, kecuali pada aspek kognitif dengan responden yang berbahasa daerah sebagai bahasa pertamanya.

5. BAHASA DIKUASAI

Tabel 13: Uji Normalitas Aspek Bahasa yang Dikuasai

Tests of Normality[c,d]

Bhs Dikuasai		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AspKog	1	.205	6	.200*	.925	6	.540
	2	.160	33	.031	.881	33	.002
AspAfek	1	.249	6	.200*	.949	6	.730
	2	.107	33	.200*	.967	33	.393

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

c. AspKog is constant when BhsDikuasai = 3. It has been omitted.

d. AspAfek is constant when BhsDikuasai = 3. It has been omitted.

Hasil uji normalitas pada tabel 12 menunjukkan bahwa 6 responden memiliki bahasa lain yang dikuasai di luar bahasa pertamanya adalah bahasa daerah, yang ditunjukkan dengan angka 1 dan 33 responden lainnya menguasai bahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan angka 2. Pada aspek bahasa yang dikuasai ini terdapat data *outlier* atau data pencilan, yaitu data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim. Baik secara univariat maupun multivariate. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstreim dalam observasi adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai dalam kelompoknya. Dalam kasus ini data berjumlah 40 responden, 33 responden menguasai bahasa Indonesia, 6 responden menguasai bahasa daerah, dan ada 1 responden yang menguasai bahasa asing. 1 responden inilah yang disebut sebagai pencilan.

Data pencilan dalam penelitian harus mendapatkan perlakuan khusus, karena dapat menyebabkan terjadinya bias pada hasil penelitian. Namun semuanya masih tergantung pada tujuan penelitian, sebab apabila nilai-nilai

ekstrim yang dimaksud memang diupayakan untuk dinilai keberadaannya atau dinilai fenomenanya, maka dalam penelitian ini pencilan tersebut dibiarkan saja.

Tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa hampir semua aspek terdistribusi normal, hanya aspek kognitif dengan informan bahasa yang dikuasai adalah bahasa Indonesia yang tidak signifikan dan terdistribusi tidak normal, yaitu 0,002 < 0,05.

6. IDENTITAS PENDUDUK

Tabel 14: Uji Normalitas Aspek Identitas Penduduk

Tests of Normality

Identitas Penduduk		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AspKog	1	.179	35	.006	.908	35	.006
	2	.337	5	.066	.880	5	.311
AspAfek	1	.135	35	.104	.938	35	.047
	2	.256	5	.200*	.870	5	.266

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Uji normalitas bedasarkan identitas kependudukan responden dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama diberi angka 1 untuk responden penduduk asli dan kategori kedua diberi angka 2 untuk responden pendatang.

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat dilihat pada kolom df responden penduduk asli sebanyak 35 orang, sedangkan 5 orang responden lainnya adalah pendatang. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data responden penduduk asli tingkat signifikansi aspek kognitif maupun afektif berada berada di bawah (<) 0,05 terdistribusi tidak normal, sedangkan tingkat signifikansi aspek kognitif dan afektif untuk data responden pendatang tingkat singnifikansinya 0,31 > 0,05 dan 0,26 > 0,05, data terdistribusi normal.

7. MOBILITAS

Tabel 15: Uji Normalitas Aspek Mobilitas

Tests of Normality

Mobilitas		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AspKog	1	.246	12	.044	.827	12	.019
	3	.227	3	.	.983	3	.747
	4	.138	16	.200*	.934	16	.281
	5	.161	9	.200*	.970	9	.899
AspAfek	1	.122	12	.200*	.970	12	.906
	3	.175	3	.	1.000	3	1.000
	4	.210	16	.058	.862	16	.021
	5	.185	9	.200*	.946	9	.646

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Uji normalitas berdasarkan frekuensi bepergian ke luar daerah responden dikelompokkan menjadi lima tingkatan yang berbeda, yaitu: (1) tidak pernah, (2) Sekali dalam sebulan, (3) Sekali dalam enam bulan, (4) Sekali dalam setahun, dan (5) 2 sampai dengan 10 tahun sekali. Berdasarkan tabel 14 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hampir semua data pada aspek kognitif terdistribusi normal, kecuali pada responden tidak pernah ke luar daerah yang ditunjukkan dengan angka (1) saja data terdistribusi tidak normal karena tingkat signifikansinya berada di bawah < 0,05 yaitu 0,01.

Pada aspek afektif, hanya data responden yang ditunjukkan dengan angka (4) saja yang terdistribusi tidak normal, yaitu responden yang keluar daerah sekali dalam setahun. Sedangkan data responden yang ditunjukkan dengan angka (1), (2), (3), dan (5) tingkat signifikansinya berada di atas > 0,05 terdistribusi normal.

Terkait dengan karakteristik skala data ordinal tersebut, maka uji korelasi Spearman termasuk statistik nonparametric yaitu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal.

3.3.2 Rerata Sikap Penggunaan Bahasa

Langkah berikutnya adalah menghitung rerata untuk mengetahui signifikansi sikap penggunaan bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daerah. Rerata, nilai maksimum dan minimum dari masing-masing aspek dan aspek total disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 16: Rata-Rata (Mean) Per Item Pertanyaan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
AspKog1	40	.20	1.00	23.00	.5750	.30107
AspKog2	40	.20	1.00	26.20	.6550	.24802
AspKog3	40	.20	1.00	25.60	.6400	.24474
AspKog4	40	.20	1.00	23.60	.5900	.26390
AspKog5	40	.20	1.00	27.20	.6800	.24724
AspKog6	40	.20	1.00	27.20	.6800	.26331
AspKog7	40	.20	1.00	26.00	.6500	.26312
AspKog8	40	.20	1.00	21.00	.5250	.27433
AspAfek1	40	.80	1.00	39.40	.9850	.05335
AspAfek2	40	.80	1.00	39.20	.9800	.06076
AspAfek3	40	.20	1.00	32.20	.8050	.16633
AspAfek4	40	.60	1.00	34.80	.8700	.10670
AspAfek5	40	.80	1.00	37.80	.9450	.09044
AspAfek6	40	.40	1.00	36.00	.9000	.12810
AspAfek7	40	.80	1.00	37.60	.9400	.09282
AspAfek8	40	.80	1.00	37.20	.9300	.09661
AspAfek9	40	.60	1.00	33.00	.8250	.10316
AspAfek10	40	.40	1.00	32.40	.8100	.11940
AspAfek11	40	.40	1.00	33.40	.8350	.15616
AspAfek12	40	.20	1.00	26.00	.6500	.21122
AspAfek13	40	.40	1.00	33.00	.8250	.15149
AspAfek14	40	.20	1.00	33.60	.8400	.16455

AspAfek15	40	.20	1.00	35.00	.8750	.17939
AspAfek16	40	.20	1.00	26.80	.6700	.25840
AspAfek17	40	.20	1.00	18.80	.4700	.20531
AspAfek18	40	.20	1.00	25.40	.6350	.21189
AspAfek19	40	.40	1.00	34.00	.8500	.16794
AspAfek20	40	.40	1.00	34.60	.8650	.12310
AspAfek21	40	.20	1.00	33.80	.8450	.16005
AspAfek22	40	.80	1.00	37.60	.9400	.09282
AspAfek23	40	.20	1.00	28.40	.7100	.23072
AspAfek24	40	.20	1.00	28.40	.7100	.23512
AspAfek25	40	.20	1.00	32.60	.8150	.19421
AspAfek26	40	.20	1.00	33.60	.8400	.18784
AspAfek27	40	.40	1.00	31.80	.7950	.18940
AspAfek28	40	.40	1.00	30.60	.7650	.14944
AspAfek29	40	.60	1.00	34.00	.8500	.13397
AspAfek30	40	.40	1.00	36.00	.9000	.12810
AspAfek31	40	.60	1.00	35.20	.8800	.10908
AspAfek32	40	.20	1.00	15.80	.3950	.23310
Valid N (listwise)	40					

Tabel 15 di atas menunjukkan aspek kognitif pada tanyaan nomor 1, 4, dan 8 memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,57, 0,59, dan 0,52. Nilai tersebut tergolong ke dalam kategori cukup baik yang terletak pada interval 0,41—0,6. Sedangkan pada tanyaan nomor 2, 3, 5, 6, dan 7 memiliki nilai rata-rata 0,65, 0,64, 0,68, 0,68, dan 0,65. Nilai tersebut tergolong ke dalam kategori baik yang terletak pada interval 0,61—0,8.

Sementara itu, aspek afektif mempunyai nilai rata-rata yang bervariasi, yaitu:

(1) Pada tanyaan nomor 32 memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,39 termasuk ke dalam kategori tidak baik, yaitu terletak pada interval 0,2—0,4.

(2) Pada tanyaan nomor 17 memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,47 termasuk ke dalam kategori cukup baik, yaitu terletak pada interval 0,41—0,6.

(3) Pada tanyaan nomor 12, 16, 18, 23, 24, 27, dan 28 memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,65, 0,67, 0,63, 0,71, 0,71,0,79, dan 0,79 termasuk ke dalam kategori baik, yaitu terletak pada interval 0,61—0,8.

(4) Pada tanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, dan 31 memiliki nilai rata-rata (*mean statistics*) sebesar 0,98, 0,98, 0.80, 0,87, 0,94, 0,90, 0,94, 0,93, 0,82, 0,81, 0,83, 0,82, 0,84, 0,87, 0,85, 0,86, 0,84, 0,94, 0,81, 0,84, 0,85, 0,90, dan 0,88 termasuk ke dalam kategori sangat baik, yaitu terletak pada interval 0,81— 1.

Tabel 17: Rata-Rata Secara Keseluruhan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AspKog	40	1.40	7.00	0.6200	1.55038
AspAfe	40	22.00	30.00	0.8100	1.62528
Valid N (listwise)	40				

Secara keseluruhan aspek kognitif memiliki nilai rata-rata sebesar 0,62. Nilai tersebut tergolong ke dalam kategori baik yang terletak pada interval 0,61—0,8. Sedangkan pada aspek afektif memiliki nilai rata-rat sebesar 0,81 tergolong dalam kategori sangat baik yang terletak pada interval 0,81—1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap pengguna bahasa Indonesia pada badan publik di Kabupaten Lombok Barat dilihat dari aspek kognitif tergolong baik, sedangkan dari aspek afektif tergolong sangat baik.

3.3.3 Analisis Korelasi Rank Spearman

Tabel 18: Analisis Korelasi Rank Spearman

Correlations			Usia	Pendidikan	Jenis Kelamin	Bhs Pertama	Bhs Dikuasai	Iden. Pend.	Mobilitas	KOGNITIF	AFEKTIF
Spearman's rho	Usia	Correlation Coefficient	1.000	.507**	.043	.064	-.217	.226	.371	.154	.053

		Sig. (2-tailed)	.	.001	.791	.696	.178	.162	.018	.341	.743
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Pendidikan	Correlation Coefficient	.507**	1.000	.122	-.104	.022	.290	.409*	.253	.019
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.453	.525	.895	.070	.009	.116	.906
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Jenis Kelamin	Correlation Coefficient	.043	.122	1.000	.162	-.162	.198	.046	.082	-.118
		Sig. (2-tailed)	.791	.453	.	.317	.319	.220	.780	.615	.467
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Bhs Pertama	Correlation Coefficient	.064	-.104	.162	1.000	-.336*	-.101	.151	-.081	-.007
		Sig. (2-tailed)	.696	.525	.317	.	.034	.536	.351	.618	.966
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Bhs Dikuasai	Correlation Coefficient	-.217	.022	-.162	-.336*	1.000	.124	-.008	-.107	.019
		Sig. (2-tailed)	.178	.895	.319	.034	.	.446	.960	.516	.906
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Identitas Pend	Correlation Coefficient	.226	.290	.198	-.101	.124	1.000	.007	.302	.079
		Sig. (2-tailed)	.162	.070	.220	.536	.446	.	.966	.058	.629
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	Mobilitas	Correlation Coefficient	.371*	.409**	.046	.151	-.008	.007	1.000	-.008	-.203
		Sig. (2-tailed)	.018	.009	.780	.351	.960	.966	.	.959	.209
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	KOGNITIF	Correlation Coefficient	.154	.253	.082	-.081	-.107	.302	-.008	1.000	.212
		Sig. (2-tailed)	.341	.115	.615	.618	.510	.058	.959	.	.189
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	AFEKTIF	Correlation Coefficient	.053	.019	-.118	-.007	.019	.079	-.203	.212	1.000
		Sig. (2-tailed)	.745	.906	.467	.966	.906	.629	.209	.189	.
		N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Analisis Korelasi Rank Spearman dimaksudkan untuk:

1. Melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan dua variabel, dengan kriteria tingkat kekuatan korelasi yang berpedoman pada nilai koefisien korelasi yang merupakan hasil output SPSS, dengan ketentuan sbb:
   1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 - 0,25 = hubungan sangat lemah.
   2. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,26—0,50 = hubungan cukup.
   3. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,51—0,75 = hubungan kuat.
   4. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76—0,99 = hubungan sangat kuat.
   5. Nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 = hubungan sempurna.
2. Melihat arah (jenis) hubungan variabel

Arah korelasi dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat kekuatan korelasi. Besarnya nilai koefisien korelasi tersebut tereletak antara +1 sampai dengan -1. Jika koefisien korelasi bernilai positif maka kedua hubungan variabel dikatakan searah.

3. Melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak

Kekuatan dan arah korelasi (hubungan) akan mempunyai arti jika hubungan antar variabel tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan yang signifikan jika nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 atau 0,01. Sementara itu, jika nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antar variabel tersebut dikatakan tidak signifikan atau tidak berarti.

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, hanya ditemukan empat variabel yang mempunyai korelasi cukup kuat dan kuat dengan variabel lain, yaitu variabel usia memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,507** terhadap variabel pendidikan, sehingga hubungan kedua variabel tersebut adalah **kuat**. Tanda bintang (**) artinya korelasi bernilai signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 0,01. Nilai koefisien korelasi variabel usia terhadap jenis kelamin dan bahasa pertama adalah sebesar 0,043 dan 0,064 yang termasuk dalam kategori memiliki hubungan sangat lemah dan tidak signifikan atau tidak berarti. Begitupula terhadap variabel identitas penduduk, kognitif dan afektif masing-masing memiliki nilai koefisien korelasi -0,217, 0,226, 0,154 dan 0,053 yang termasuk dalam kategori memiliki hubungan sangat lemah karena memiliki nilai koefisien korelasi yang terletak antara 0,00 - 0,25 dan tidak signifikan. Nilai koefisien korelasi variabel bahasa yang dikuasai bernilai negatif (-) yang mengindikasikan bahwa variabel usia dengan variabel bahasa yang dikuasai memiliki arah hubungan yang berlawanan dan tidak signifikan. Sementara itu, nilai koefisien korelasi variabel usia terhadap mobilitas sebesar 0,371 yang mengindikasikan hubungan yang **cukup kuat** dan signifikan, karena memiliki nilai signifikansi < 0,05.

Nilai koefisien korelasi variabel pendidikan terhadap mobilitas sebesar 0,409 yang mengindikasikan hubungan yang **cukup kuat** dan signifikan, karena terletak antara 0,26—0,50. Selanjutnya variabel yang mempunyai korelasi **cukup kuat** adalah variabel identitas kependudukan terhadap variabel kognitif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,302.

3.4 Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat

Pada subbagian ini akan disampaikan hasil analisis kesalahan berbahasa Indonesia di media luar ruang. Analisis menggunakan penghitungan dan persentase sederhana. Untuk lebih jelas, kesalahan-kesalahan tersebut akan disampaiakn dalam tabel berikut.

Tabel 19: Persentase Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat

No.	Jenis Kesalahan	Jumlah Kesalahan	Persentase
1	**Kesalahan Ejaan** 1) Kesalahan Bentuk Penulisan Kata 2) Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 3) Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital	19 38 2	22,09% 44,18% 2,32%
2	Bentuk-Bentuk Kesalahan Diksi	-	0
3	Bentuk-Bentuk Kesalahan Struktur Kata	1	1,16%
4	Bentuk-Bentuk Kesalahan Karena Penggunaan Istilah Asing	26	30,23%
Jumlah		86	100%

Nilai koefisien korelasi variabel pendidikan terhadap mobilitas sebesar 0,409 yang mengindikasikan hubungan yang **cukup kuat** dan signifikan, karena terletak antara 0,26—0,50. Selanjutnya variabel yang mempunyai korelasi **cukup kuat** adalah variabel identitas kependudukan terhadap variabel kognitif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,302.

3.4 Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat

Pada subbagian ini akan disampaikan hasil analisis kesalahan berbahasa Indonesia di media luar ruang. Analisis menggunakan penghitungan dan persentase sederhana. Untuk lebih jelas, kesalahan-kesalahan tersebut akan disampaiakn dalam tabel berikut.

Tabel 19: Persentase Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat

No.	Jenis Kesalahan	Jumlah Kesalahan	Persentase
1	**Kesalahan Ejaan** 1) Kesalahan Bentuk Penulisan Kata 2) Kesalahan Penggunaan Tanda Baca 3) Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital	38 44 9	26,95% 31,20% 6,38%
2	Bentuk-Bentuk Kesalahan Diksi	8	5,67%
3	Bentuk-Bentuk Kesalahan Struktur Kata	11	7,80%
4	Bentuk-Bentuk Kesalahan Karena Penggunaan Istilah Asing	31	21,98%
Jumlah		141	100%

Data foto penggunaan bahasa Indonesia di badan publik Kabupaten Lombok Barat yang terkumpul sebanyak 107 foto. Dari 107 foto tersebut ditemukan 141 kesalahann. Kesalahan penggunaan tanda baca menduduki peringkat paling tinggi yaitu 31,20%. Peringkat kedua kesalahan bentuk penulisan kata mencapai 26,95%, selanjutnya kesalahan pada penggunaan struktur istilah asing mencapai 21,98%, kesalahan kesalahan struktur mencapai 7,80% penggunaan huruf kapital mencapai 6,38 %, dan kesalahan pilihan kata atau diksi 5,67%. (tabel analisis kesalahan berbahasa Indonesia di badan publik daerah Kabupaten Lombok Barat terlampir).

Berikut ini beberapa contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di Badan Publik Kabupaten Lombok Barat.

a. Bentuk-Bentuk Kesalahan Ejaan

Kesalahan ejaan yang ditemukan pada data berupa kesalahan penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penggunaan huruf kapital. Berikut ini akan diuraikan bentu-bentuk kesalahan dimaksud.

1) Kesalahan Bentuk Penulisan Kata

(1) **TERIMAKASIH** UNTUK TIDAK MEROKOK



Kesalahan yang terdapat pada spanduk di atas adalah kesalahan pada penulisan kata *terimakasih*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk penulisan yang tepat untuk kata *terimakasih* adalah ditulis terpisah, tidak dirangkaikan. Dengan demikian, penulisan yang benar untuk informasi di atas adalah sebagai berikut.

(1a) **TERIMA KASIH** UNTUK TIDAK MEROKOK

(2) HARI **BHAKTI PU KE 71**

(3) Foto **Obyek** Wisata



Kesalahan yang terdapat pada data (2) dan (3) adalah kesalahan pada penulisan kata *bhakti* dan *obyek*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk baku kata *bhakti* adalah *bakti* dan kata *obyek* adalah *objek*. Selain itu penulisan ke 71 seharusnya diberi tanda hubung (-). Oleh karena itu penulisan yang benar untuk informasi tersebut adalah sebagai berikut.

(2a) HARI BAKTI PU KE-71

(3a) Foto Objek Wisata

2) Kesalahan Penggunaan Tanda Baca



(5) DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
JL. SOEKARNO HATTA TELP (0370) 6184407
GIRI MENANG GERUNG

(6) PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS KABUPATEN LOMBOK BARAT
Hari kerja
Senin - Jumat: Pukul 08.00 - 15.30 WITA

Kesalahan yang terdapat pada papan nama instansi (5) adalah kesalahan penggunaan tanda koma (,) untuk memisahkan bagian-bagian alamat. Dengan demikian, penulisan yang benar pada papan nama tersebut adalah sebagai berikut.

(5a) DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
JALAN SOEKARNO HATTA, TELEPON (0370) 6184407,
GIRI MENANG, GERUNG

Kesalahan pada papan (6) adalah penggunaan tanda hubung (-) untuk menulis kata sampai dengan. Penulisan seperti itu masih tidak tepat. Seharusnya, tanda baca yang digunakan adalah tanda pisah (—), bukan tanda hubung sehingga perbaikannya menjadi seperti berikut.

(6a) PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS KABUPATEN LOMBOK BARAT
Hari kerja
Senin—Jumat: Pukul 08.00—15.30 WITA

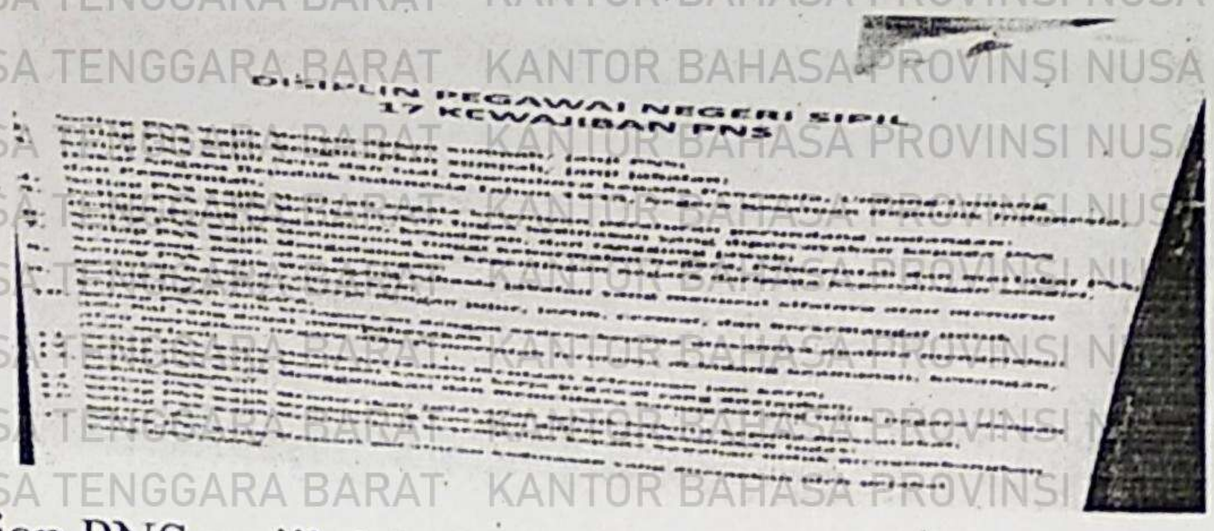


(7) KEPALA DINAS
Ir. H.A. SUBANDI
NIP. 196308281990031006

Kesalahan yang terdapat pada papan struktur organisasi instansi tersebut adalah kesalahan penggunaan tanda titik pada singkatan NIP. Dalam kaidah ejaan diatur bahwa singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan usaha atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Dengan demikian, penulisan yang benar pada papan nama tersebut adalah sebagai berikut.

(7a) KEPALA DINAS
Ir. H.A. SUBANDI
NIP196308281990031006

3) Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital



(8) Setiap PNS wajib Mengucapkan sumpah/janji PNS

Pada spanduk (8) kesalahan penggunaan ejaan yang berupa kesalahan pemakaian huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan adalah terdapat dalam kata *Mengucapkan.* Kata mengucapkan tidak seharusnya menggunakan huruf m kapital, karena berada di tengah kalimat. Oleh karena itu, bentuk yang tepat untuk penulisan informasi pada spanduk tersebut adalah sebagai berikut.

(9a) Setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/ janji PNS

b. Bentuk-Bentuk Kesalahan Struktur Kata

(10) **untuk** tempat ditentukan oleh masing-masing dusun
Hal-hal yang kurang jelas bisa **di tanyakan** kepada sekdes
Batulayar 081917245517

Ada beberapa kesalahan pada papan pengumuman (10). Pertama pada kata *di tanyakan.* Kata *di-* pada papan tersebut merupakan imbuhan (awalan) bukan preposisi penulisannya harus serangkai menjadi *ditanyakan.* Kedua, kata *untuk* pada awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital, dan yang ketiga informasi kurang jelas. Koreksi pada papan pengumuman tersebut adalah.

(10a) **Untuk** tempat ditentukan oleh masing-masing dusun.
Hal-hal yang kurang jelas bisa **ditanyakan** kepada sekdes Batulayar dengan menghubungi nomor ponsel 081917245517.

c. Bentuk-Bentuk Kesalahan Karena Penggunaan Istilah Asing



(11) **STOP**
PUNGLI!!!
LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA
CALL/SMS **CENTER** 081999193838



(12) Mengisi form permintaan pustakaan



(13) BEKERJA DALAM TIM DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK NELAYAN LOCAL DAN REGIONAL

(14) ...BEKERJA SAMA ERAT DENGAN STAFF DKP SETEMPAT

Istilah asing banyak digunakan tanpa memperhatikan kaidah penggunaan dan penyerapan unsur asing yang diatur dalam gramatikal Bahasa Indonesia. Penggunaan istilah asing dengan mengadopsi secara langsung hanya diperbolehkan jika istilah tersebut memang sama sekali belum ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia. Adapun adopsi kata secara tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyerapan unsur asing yang diatur dalam gramatikal Bahasa Indonesia. Istilah seperti (11) stop, call, center, (12) form, (13) local dan (14) staf telah memiliki padanan kata dalam Bahasa Indonesia yaitu: *setop, hubungi, pusat layanan, formulir, lokal,* dan *staf.* Jika istilah asing belum ada padanannya dalam Bahasa indonesi, cara penulisannya adalah dengan menggunakan huruf miring.. Dengan demikian koreksi kalimat di atas adalah:

(11a) **SETOP**
PUNGLI!!!
LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA
HUBUNGI/KIRIM PEASN SINGKAT KE PUSAT LAYANAN
081999193838

(12a) Mengisi formulir permintaan pustakaan

(13a) BEKERJA DALAM TIM DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK NELAYAN LOKAL DAN REGIONAL

(14a) ..BEKERJA SAMA ERAT DENGAN STAFF DKP SETEMPAT

BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sikap pengguna bahasa Indonesia di Badan Publik Daerah Kabupaten Lombok Barat dari aspek kognitif tergolong dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 0,62. Sedangkan pada aspek afektif memiliki nilai rata-rata sebesar 0,81 tergolong dalam kategori sangat baik yang terletak pada interval 0,81—1.

Korelasi antarvariabel dapat disimpulkan bahwa (1) hampir semua variabel baik itu usia, pendidikan, jenis kelamin, bahasa pertama, bahasa yang dikuasai, identitas kependudukan, dan mobilitas memiliki hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan atau tidak berarti terhadap variabel kognitif dan afektif, kecuali variabel identitas kependudukan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel kognitif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,302. (2) variabel usia responden memiliki pengaruh kuat terhadap variabel tingkat pendidikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,507, (3) variabel usia responden memiliki pengaruh cukup kuat terhadap variabel mobilitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,371, dan (4) variabel pendidikan memiliki pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap variabel mobilitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,409.

Dari segi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di badan publik Kabupaten Lombok Barat, kesalahan penggunaan tanda baca menduduki peringkat paling tinggi yaitu 31,20%. Peringkat kedua kesalahan bentuk penulisan kata mencapai 26,95%, selanjutnya kesalahan pada penggunaan struktur istilah asing mencapai 21,98%, kesalahan kesalahan struktur mencapai 7,80% penggunaan huruf kapital mencapai 6,38 %, dan kesalahan pilihan kata atau diksi 5,67%.

4.2 Saran

Penelitian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di badan publik daerah sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sikap pengguna bahasa

Indonesia di badan publik. Hal ini tidak lain karena badan publik merupakan tempat publik yang diakses oleh masyarakat umum. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian serupa di daerah lain. Analisis pada penelitian berikutnya harus lebih dalam dengan memperkuat instrumen yang digunakan serta metode yang dipakai. Yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut setelah dilakukan penelitian, yaitu penertiban penggunaan bahasa Indonesia pada papan-papan nama, spanduk, reklame, dan baliho di badan publik dan tempat-tmpat umum.

Daftar Pustaka

Anderson, Edmud A. 1974. "Sosiolinguistik" dalam Sumarsono dan Partana Paina (Ed) 2002.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. 2012. 'Badan Bahasa Melakukan Pemantuan Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Surakarta. Badan bahasa.kemdiukbud.go.id diunduh tanggal 22 Februari 20017.

Chaer, Abdul dan Agustina, Leonie. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Dowdy, Shirley; Wearden, Stanley, dan Chilko, Daniel. 2004. *Statistic for Research: Third Edition.* Canada: Wiley-Interscience.

Finoza, Lamuddin. 2001. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Hariro, Zamzam, M.Pd. 2013. 'Ekspedisi Bahasa dan Sastra di Wilayah Wisata'. Laporan Penelitian: Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Husnan, Lalu Erwan dkk. 2014. 'Sikap Penutur Bahasa Indonesia di Wilayah Wisata di Pulau Lombok'. Mataram: Laporan Penelitian Kantor Bahasa Provinsi NTB

Indrawati, Sri. 2008. 'Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga, Sudah Benarkah?' *Kongres IX Bahasa Indonesia*: Jakarta

Kantor Bahasa Provinsi NTB. 2007. "Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang" Mataram.

Kantor Bahasa Provinsi NTB. 2008. "Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang" Mataram.

Keraf, Gorys. 2002. *Diksi dan Gaya Bahasa.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa.* Ende: Nusa Indah.

Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode, dan Tekniknya.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Noviandy. 2014. 'Persepsi masyarakat tentang Penggunaan Iklan Media Luar Ruang Terhadap Estetika Kota Samarinda.' *E-Journal Ilmu Komunikasi.ISSN 0000-0000.*fisip-unimul.ac.id.

Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Ravid, Ruth. 2011. *Practical Statistics for Educators.* United Kingdom: Rowman dan Littlefield Publishers.

Sugono, Dendy. 1999. *Berbahasa Indonesia dengan Benar.* Edisi Revisi. Jakarta: Puspa swara.

_____. 2008a. *Buku Praktis Bahasa Indonesia 1.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

_____.2008b. *Buku Praktis Bahasa Indonesia 2.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

_____.2008c. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.* Jakarta: PT Gramedia.

_____. 2008d. *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing.* Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Sugono, Dendy. 1999. *Berbahasa Indonesia dengan Benar.* Edisi Revisi. Jakarta: Puspa swara.

Ridwan, dan Sunarto. 2009. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Roscoe, 1975. 'Sampel' dalam Martadiputra, Bambang Avip Priatna (2015) yang disampaikan dalam Pelatihan Sikap Bahasa: Pelatihan Sosiolinguistik dalam Rangka Penelitian Sikap Bahasa. Bandung: Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.

Sugiyono, 2011.*Akomodasi Bahasa Masyarakat Perkotaan di Indonesia.* Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Suwito. 1983. Pengantar Awal Sosiolinguistik Teori dan Problema. Surakarta: Henari Offset Solo.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wahidah, Baiq. 2014. '*Language Attitude* Mayarakat Pedaleman Suralga Lombok Timur terhadap Bahasa Halu.' Disampaikan pada *Kongres Bahasa Daerah NTB 2014.*

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KUESIONER SIKAP BAHASA

Nomor kuesioner : .....
Alamat informan : ..... Tanggal .....
Nama pengumpul data: .....

Penelitian ini merupakan penelitian bahasa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik. Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Anda untuk menjadi responden penelitian ini. Kami sangat mengharapkan Anda mengisi kuesioner dengan sungguh-sungguh dan jujur (apa adanya).

A. Ciri Responden

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan identitas Anda.

1. Usia
   [ ] kurang dari 30 tahun [ ] antara 31—40 tahun [ ] antara 41—50 tahun
   [ ] lebih dari 51 tahun
2. Pendidikan tertinggi
   [ ] tidak sekolah [ ] SD [ ] SLTP [ ] SLTA [ ] S-1 [ ] S-2 [ ] S-3
3. Jenis kelamin
   [ ] laki-laki [ ] wanita
4. Bahasa pertama Anda
   [ ] bahasa daerah [ ] bahasa Indonesia [ ] bahasa asing
5. Bahasa apa yang paling Anda kuasai selain bahasa pertama
   [ ] bahasa daerah [ ] bahasa Indonesia [ ] bahasa asing
6. Identitas kependudukan
   [ ] penduduk asli [ ] pendatang
7. Frekuensi bepergian ke luar daerah
   [ ] tidak pernah [ ] sekali dalam sebulan [ ] sekali dalam enam bulan
   [ ] sekali dalam satu tahun [ ] 2--10 tahun sekali

B. Angket berkaitan dengan aspek kognitif

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang disediakan sebagai respons terhadap pernyataan yang disampaikan pada kolom sebelah kiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak Tahu (TT) Kurang Tahu (KT) Cukup Tahu (CT)
Tahu (T) Sangat Tahu (ST)

No.	Pertanyaan	ST	T	CT	KT	TT
1.	Apakah Anda mengetahui isi Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (ditulis isinya)					
2.	Apakah Anda mengetahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan?					
3.	Apakah Anda mengetahui isi pasal 30 UU Nomor 24					

	Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan? Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah.					
4.	Apakah Anda mengetahui isi pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan? (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebutdan/atau bahasa Inggris.					
5.	Apakah Anda mengetahui isi pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan? (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.					
6.	Apakah Anda mengetahui isi pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan? Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.					
7.	Apakah Anda mengetahui isi pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan? (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana					

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

	dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.					
8.	Apakah Anda mengetahui Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah?					

C. Angket berkaitan dengan aspek afektif

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang disediakan sebagai respons terhadap pernyataan yang disampaikan pada kolom sebelah kiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Ragu-ragu (R)
Tidak Setuju (ST) Sangat Tidak Setuju (STS)

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Saya harus mempertahankan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.					
2.	Saya harus mempertahankan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.					
3.	Saya akan memadankan/menerjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dalam lingkungan kantor saya.					
4.	Saya akan memilih istilah bahasa Indonesia daripada bahasa asing.					
5.	Saya mengutamakan menggunakan Bahasa Indonesia di lingkungan kerja.					
6.	Saya menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan mitra kerja.					
7.	Saya menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan papan nama, papan petunjuk, poster dan spanduk.					
8.	Saya menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi: surat, nota kerja sama, dan notula.					
9.	Saya mengoreksi kesalahan penggunaan bahasa staf saya.					
10.	Saya mengoreksi kesalahan penggunaan bahasa rekan kerja saya.					
11.	Saya memberikan arahan kepada staf saya untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia.					
12.	Saya mengizinkan karyawan saya menggunakan bahasa asing di lingkungan kerja.					
13.	Saya memelihara bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga.					
14.	Saya memelihara bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam berkomunikasi di lingkungan sosial.					
15.	Saya selalu menggunakan bahasa Indonesia secara teratur untuk mempertahankan bahasa Indnesia sebagai bahasa negara.					

16.	Saya menggunakan bahasa asing ketika berkomunikasi dengan rekan kerja.					
17.	Saya memotivasi karyawan agar belajar bahasa asing untuk meningkatkan kompetensinya.					
18.	Saya mendukung karyawan saya menggunakan bahasa asing.					
19.	Saya akan menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia di luar negeri.					
20.	Saya akan menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang asing yang dapat berbahasa Indonesia.					
21.	Saya nyaman menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang yang berasal dari etnis lain.					
22.	Saya senang bahasa Indonesia digunakan di berbagai daerah di Indonesia.					
23.	Saya suka menggunakan bahasa asing di lingkungan kerja.					
24.	Saya suka menggunakan bahasa asing ketika berkomunikasi dengan mitra kerja.					
25.	Menurut saya, bahasa Inggris lebih penting daripada bahasa Indonesia dalam dunia kerja.					
26.	Menurut saya, bahasa Indonesia tidak terlalu penting dalam dunia kerja.					
27.	Saya yakin, bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional.					
28.	Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari oleh orang asing.					
29.	Saya selalu berbahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah bahasa yang benar.					
30.	Saya menganjurkan rekan kerja saya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.					
31.	Saya menganjurkan rekan kerja saya untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan memperhatikan norma sosial.					
32.	Saya tidak peduli jika rekan kerja tidak berbahasa dengan santun.					

Informan

( )

Lampiran 1:

Daftar Isian Survei Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daerah

No	Nama Media		Gambar
	Lokasi		
	Tanggal pengambilan		
	Staf/Peneliti		

No	Nama Media		Gambar
	Lokasi		
	Tanggal pengambilan		
	Staf/Peneliti		

No	Nama Media		Gambar
	Lokasi		
	Tanggal pengambilan		
	Staf/Peneliti		

No	Nama Media		Gambar
	Lokasi		
	Tanggal pengambilan		
	Staf/Peneliti		

No	Nama Media		Gambar
	Lokasi		
	Tanggal pengambilan		
	Staf/Peneliti		

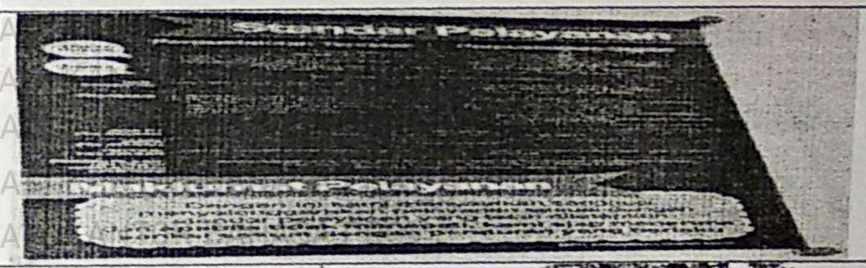
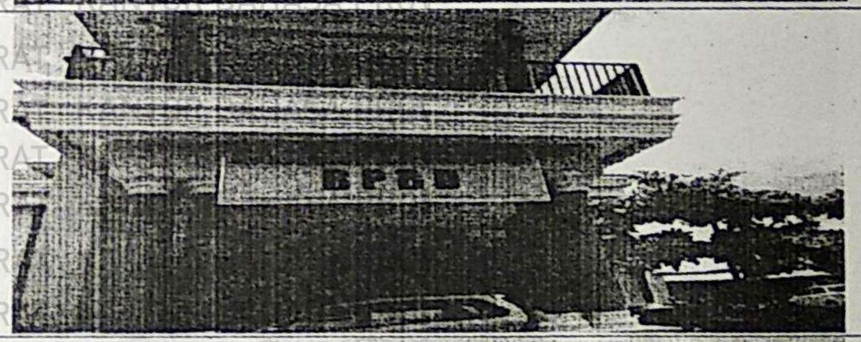
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

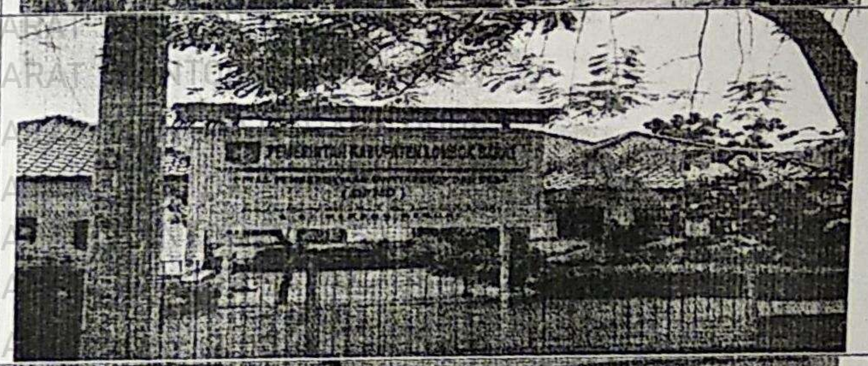
DATA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI BADAN PUBLIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Redaksi	Kesalahan Bahasa	Perbaikan Kesalahan Bahasa	Foto Media
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

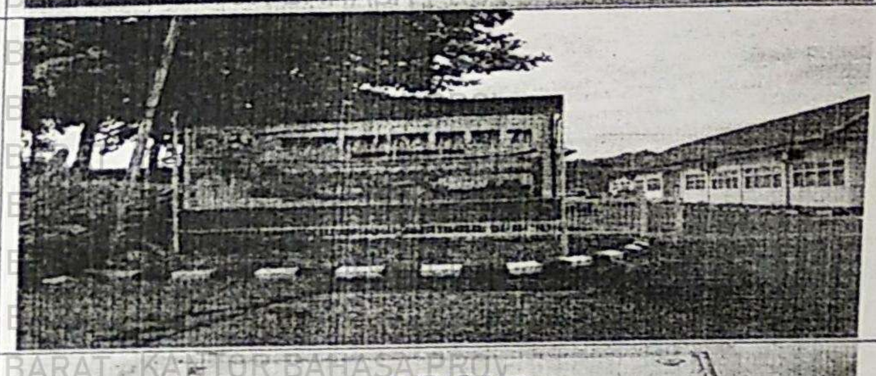
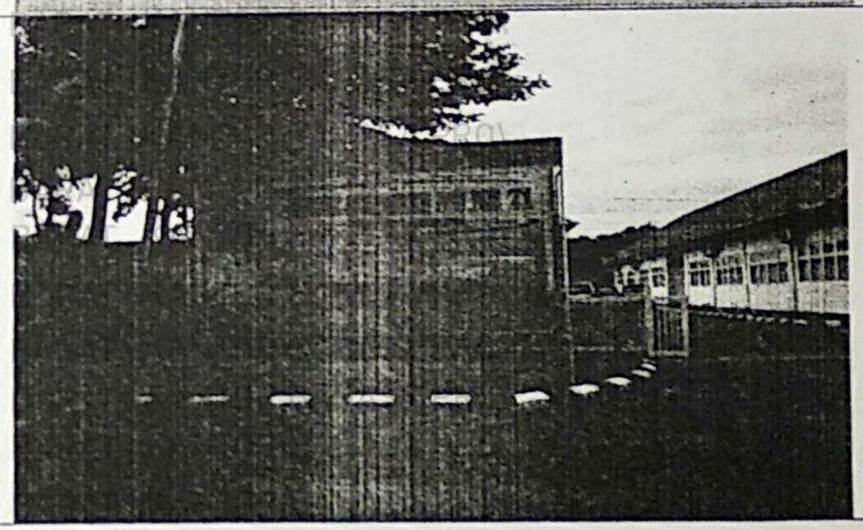
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DATA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAGI BADAN PUBLIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

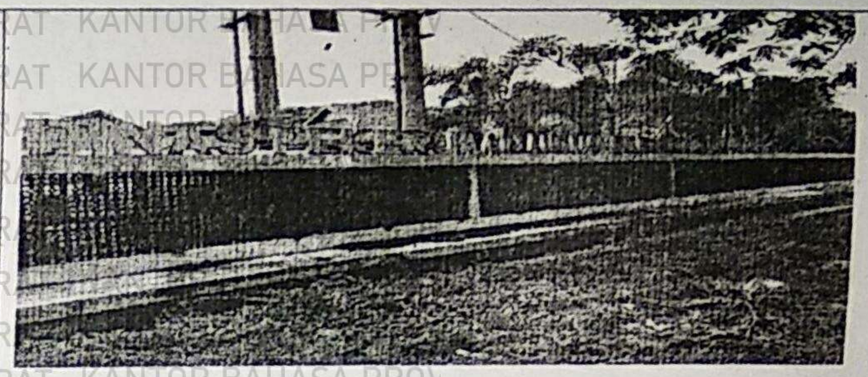
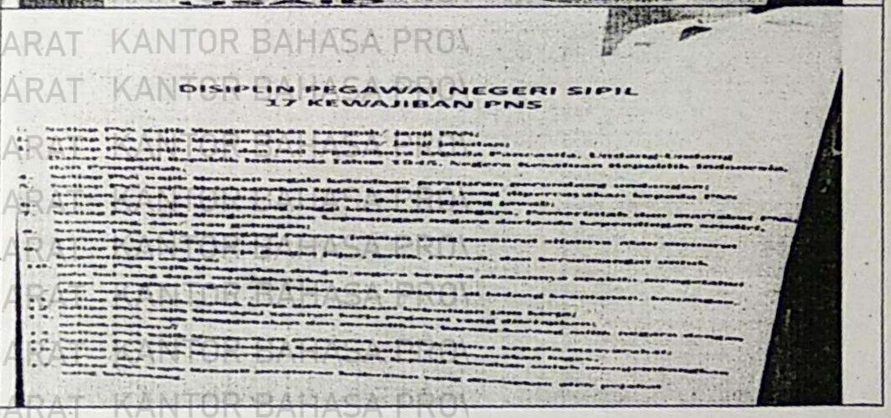
No.	Redaksi	Kesalahan Bahasa	Perbaikan Kesalahan Bahasa	Foto Media
1	Website Senin – Jumat, Pukul 08 – 15.30 WITA	- Penggunaan Istilah asing - Tanda baca	situs web Senin—Jumat, Pukul 08—15.30 WITA	
2	Jl. SOEKARNO HATTA TELP (0370) 6184407 GIRI MENANG GERUNG	- Penulisan Kata - Tanda baca	JALAN SOEKARNO HATTA, TELEPON (0370) 6184407, GIRI MENANG, GERUNG	
3	Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang.Gerung 83363, Telp dan Faks (0370) 6184203, email: bpbd.lobar@hotmail.com	- Penulisan Kata - Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung 83363, Telepon dan Faksimile (0370) 6184203, Posel: bpbd.lobar@hotmail.com”	
4	**STOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **CALL**/SMS CENTER 081999193838	- Penggunaan Istilah asing	**SETOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **HUBUNGI**/KIRIM PEASN SINGKAT KE PUSAT LAYANAN 08199919383	

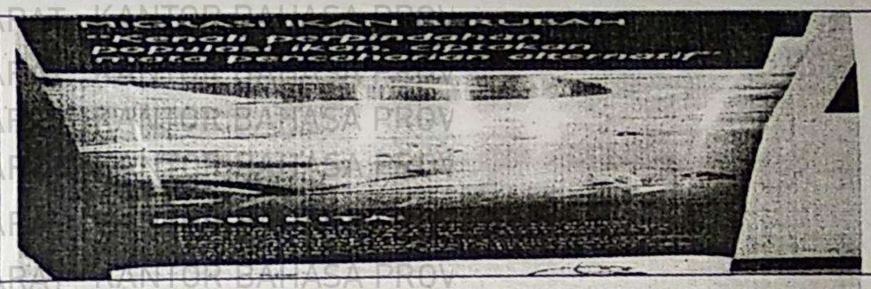
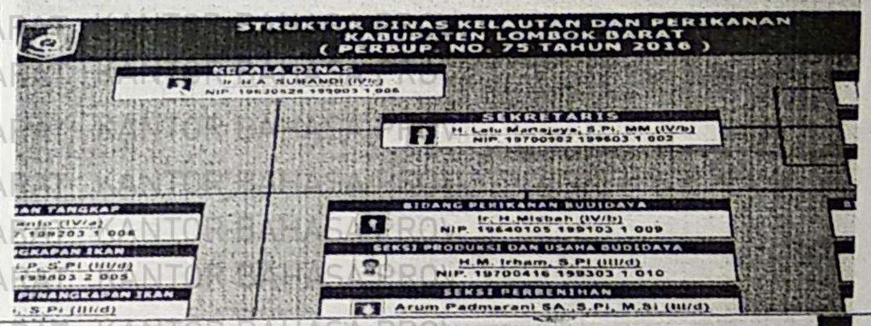
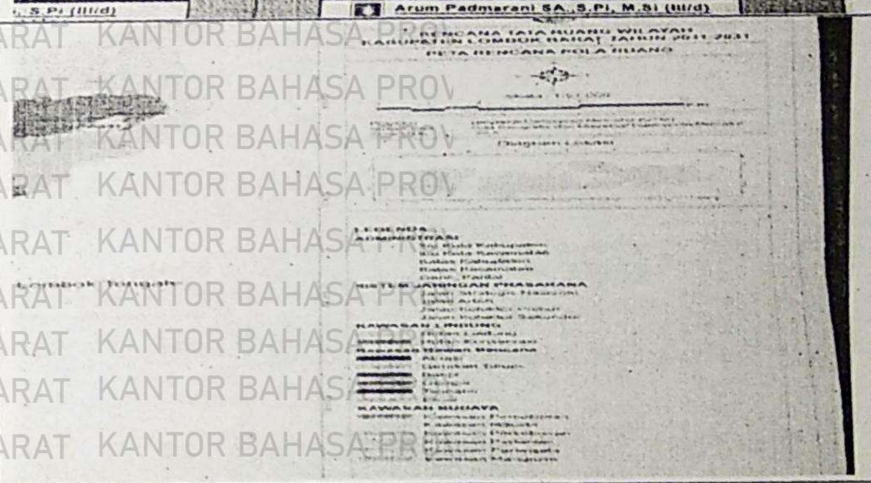
5	JL. SOEKARNO HATTA NO. TELP. 681647 GIRI MENANG GERUNG	- Penulisan Kata - Tanda baca	Jalan Soekarno Hatta No. , Telepon 681160, Giri Menang, Gerung	
6	JL. SOEKARNO HATTA NO.2 TLP. FAX (0370) 681647 GIRI MENANG GERUNG	- Penulisan Kata - Tanda baca	Jalan Soekarno Hatta No. 2, Telepon dan Faksimile (0370) 681647, Giri Menang, Gerung	
7	-	-	-	
8	Bekerja dengan jujur, adil dan amanah Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif	- Tanda baca	Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif	

9	-	-	-	
10	Menjaga ketenangan, ketertiban dan kebersihan perpustakaan Form	- Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	- Menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan perpustakaan - Formulir	
11	perstatistikan	- Penulisan Kata	statistika	
12	No Smoking Terimakasih Rp. 50.000.000	- Penulisan Kata - Penggunaan Istilah asing	Dilarang Merokok Terima kasih Rp50.000.000	

13	file, locker, login, PC, Form, Website Senin-junat; Pukul 08.00-15.30 WITA	- Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	arsip, loker, masuk, komputer pribadi, formulir, situs web Senin—junat; Pukul 08.00—15.30 WITA	
14	Bhakti “...KE 71	- Penulisan Kata	Bakti “..KE-71	
15	Terimakasih ...promosi dan/atau penggunaan rokok	- Tanda baca - Penulisan Kata	Terima kasih ...promosi, dan/atau penggunaan rokok	
16	Bhakti “...KE 71	- Penulisan Kata	Bakti “...KE-71	

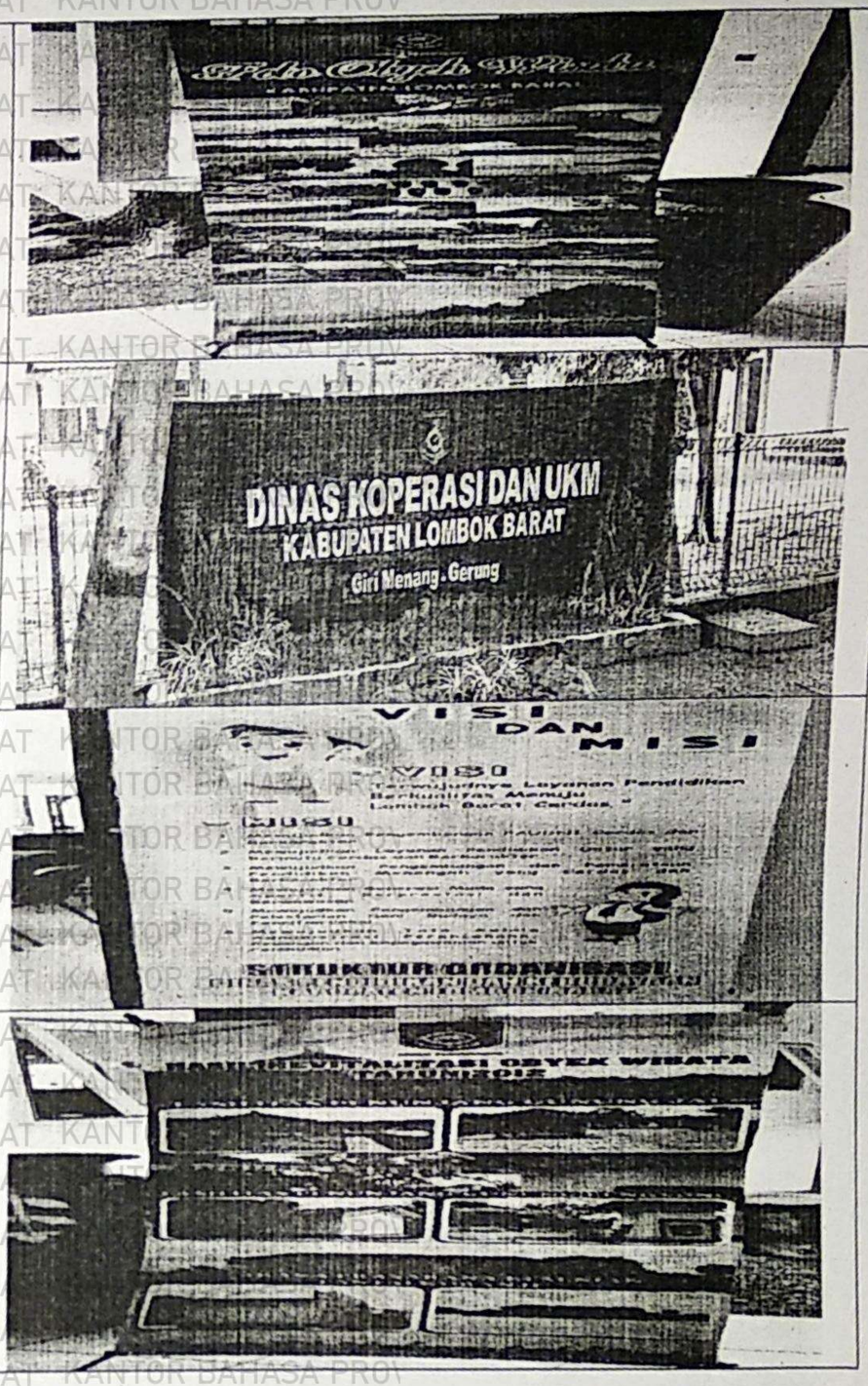
17	-	-	-	
18	17 April 1958-17 April 2013 1958-2013	- Tanda baca	17 April 1958—17 April 2013 1958—2013	
19	-	-	-	
20	**STOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **CALL/SMS CENTER** 081999193838	- Penggunaan Istilah asing	**SETOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **HUBUNGI**/KIRIM PEASN SINGKAT KE PUSAT LAYANAN 081999193838	

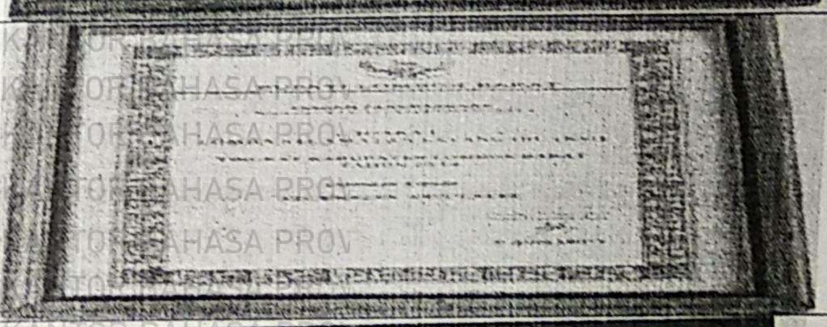
21	-	-	-	
22	**STOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **CALL/SMS CENTER** 081999193838	- Penggunaan Istilah asing	**SETOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **HUBUNGI**/KIRIM PEASN SINGKAT KE PUSAT LAYANAN 081999193838	
23	-	-	-	
24	Setiap PNS wajib Mengucapkan sumpah/janji PNS perundang undangan ..., pemerintah dan martabat PNS”.	- Ejaan (kapital) - Tanda baca	Setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS perundang-undangan ..., pemerintah, dan martabat PNS”.	

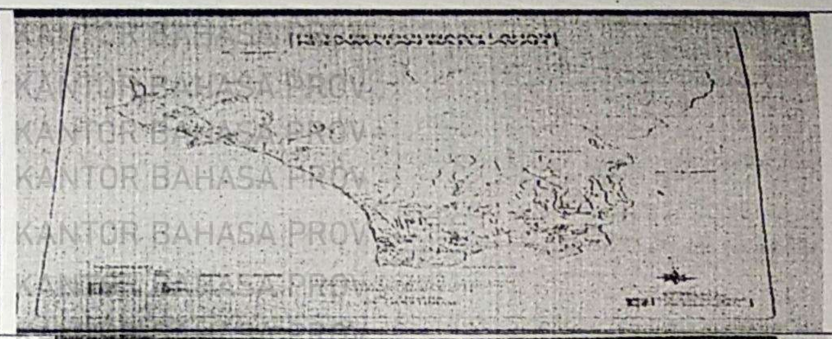
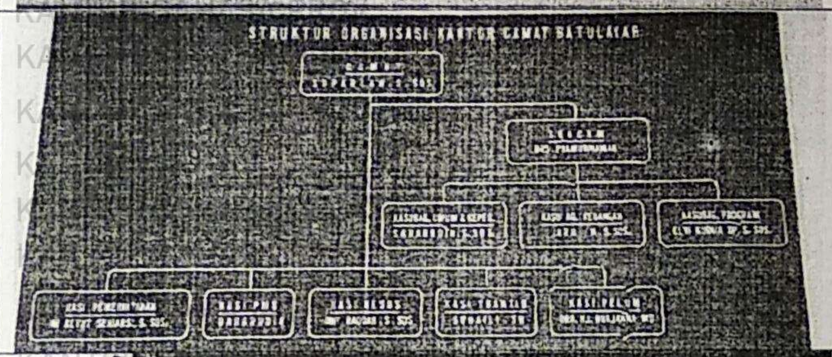
25	Local, Staff	- Penggunaan Istilah asing	lokal, staf	
26	(PERBUD. NO. 75 TAHUN 2016) NIP. 19630828 199003 1 006	- Penulisan Kata	(PERBUD. NO. 75 TAHUN 2016) NIP196308281990031006	
27	...TAHUN 2011-2031 51,000 Skala :.. Universal Transverse Mercator (UTM)" dan "Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator	- Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	....TAHUN 2011—2031 51.000 Skala:.. *Universal Transverse Mercator (UTM)" dan "Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator*	
28	Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Kode Pos 83363 Email	- Penulisan Kata - Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kode Pos 83363 Surel	

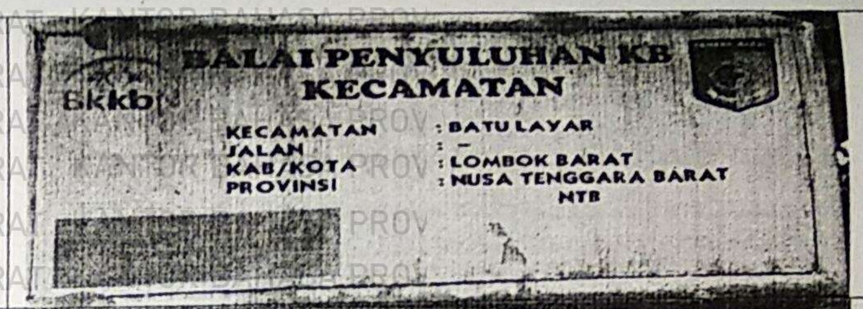
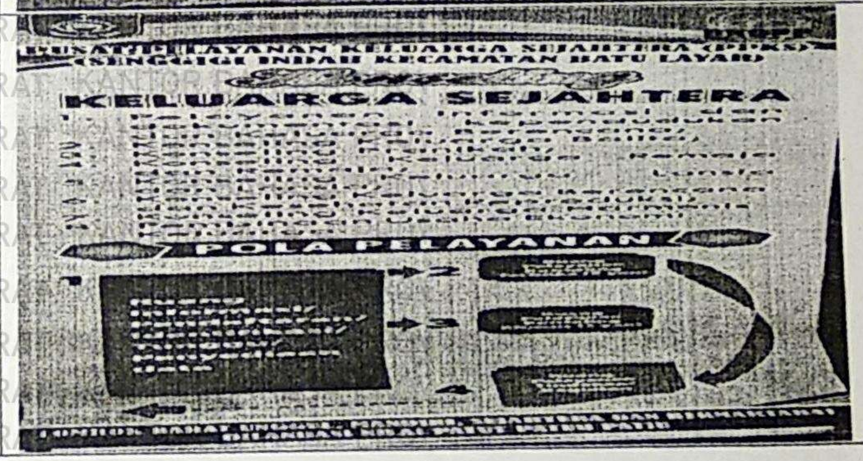
29	**STOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **CALL/SMS CENTER** 081999193838	- Penggunaan Istilah asing	**SETOP** PUNGLI!!! LAPORKAN SELURUH JENIS PUNGLI DI SEKITAR KITA **HUBUNGI**/KIRIM PEASN SINGKAT KE PUSAT LAYANAN 081999193838	
30	Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Kode Pos 83363 Email	- Penulisan Kata - Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kode Pos 83363 Surel	
31	Jl. Soekarno Hatta Giri Menan, Gerung Kode Pos 8336 Dharma	- Penulisan Kata - Tanda baca	Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kode Pos 8336 Darma	
32	Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Kode Pos 8336	- Penulisan Kata - Tanda baca	Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kode Pos 8336	

33	Obyek	- Penulisan Kata	Objek
34	Giri Menang-Gerung	- Penulisan Kata - Tanda baca	Giri Menang, Gerung
35	-	-	-
36	Obyek	- Penulisan Kata	Objek

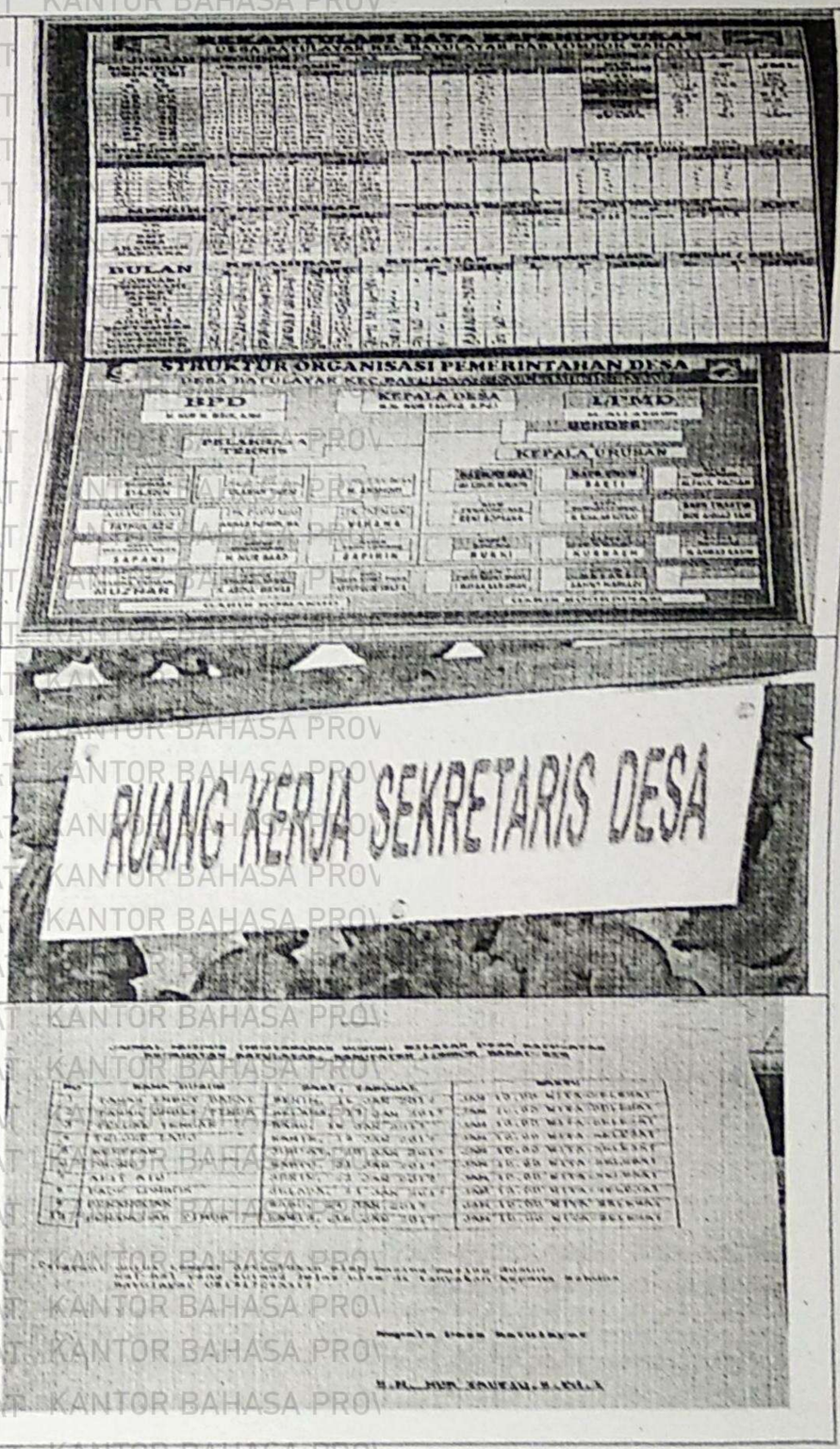


37	5 Juli s.d 8 Juli 2012	- Tanda baca	5 Juli s.d. 8 Juli 2012	
38	-	-	-	
39	-	-	-	
40	Gerung 1 November 2012 DR. H. ZAINY ARONY,M.Pd.	- Penulisan Kata - Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	Gerung, 1 November 2012 DR. H. ZAINY ARONY, M.Pd.	

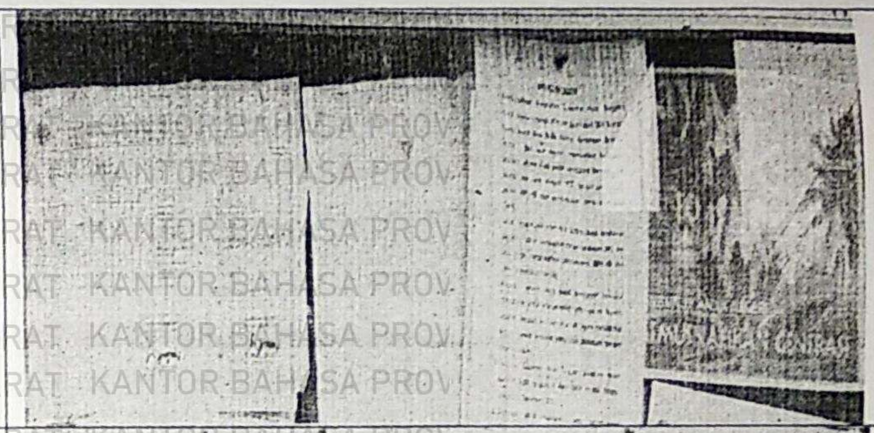
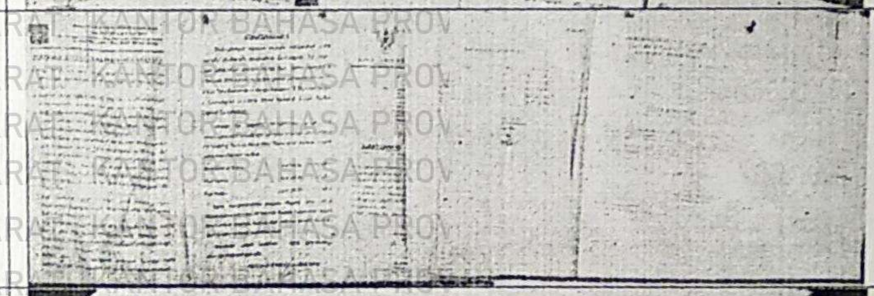
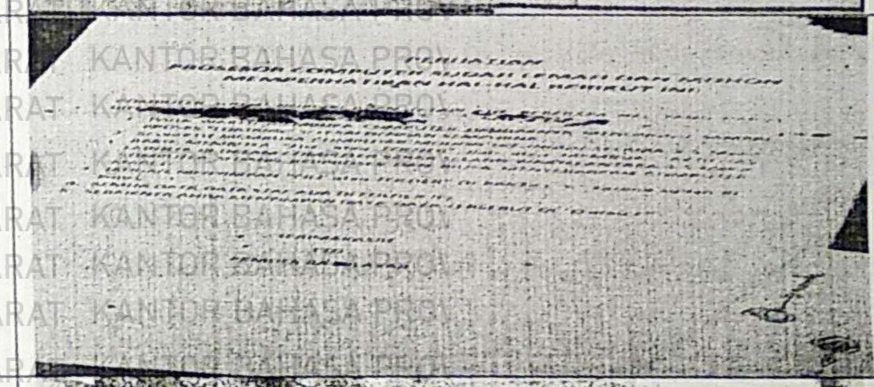
41	-	-	
42	-	-	
43	-	-	
44	Microsoft Office Jl. Raya Senggigi Km 15 Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar ..Kecamatan Batulayar Kab. Lombok Barat Prov. NTB...". COPY	- Penulisan Kata - Tanda baca - Penggunaan Istilah asing	Microsoft Office Jalan Raya Senggigi Km 15, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar ...Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat, Prov. NTB...". KOPI

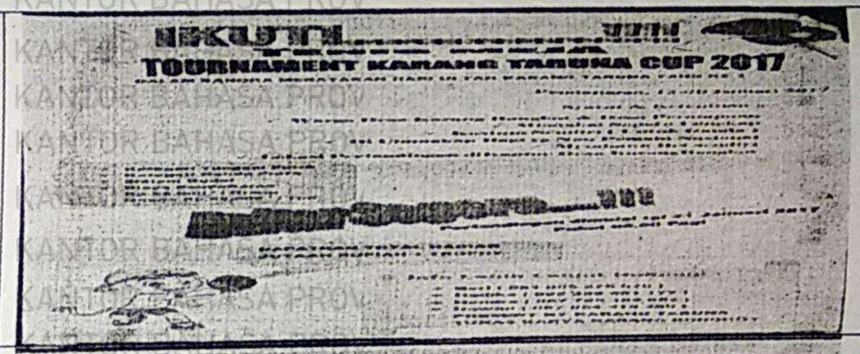
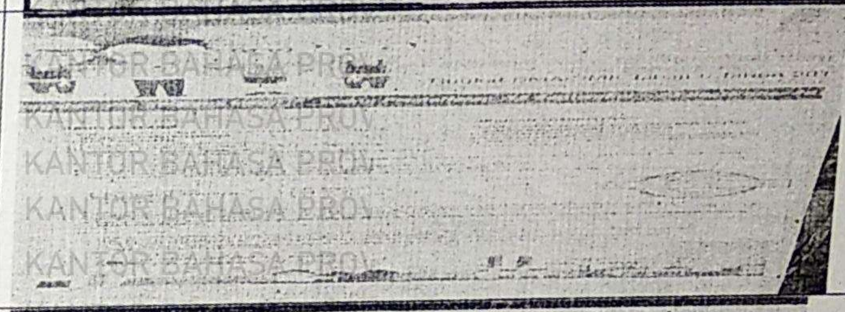
45	-	-	-	
46	Jl. Raya Senggigi - KM 15 - Tlp. 0817364500 Batulayar - Lombok Barat	- Penulisan Kata - Tanda baca	Jalan Raya Senggigi, KM 15, Telepon 0817364500, Batulayar, Lombok Barat	
47	..., Keluarga Berencana dan ...	- Tanda baca	..., Keluarga Berencana, dan ...	
48	Jl. Senggigi Indah Kecamatan Batu Layar ..., mandiri, sejahtera dan ...	- Penulisan Kata - Tanda baca	Jalan Senggigi Indah, Kecamatan Batu Layar ..., mandiri, sejahtera, dan ...	

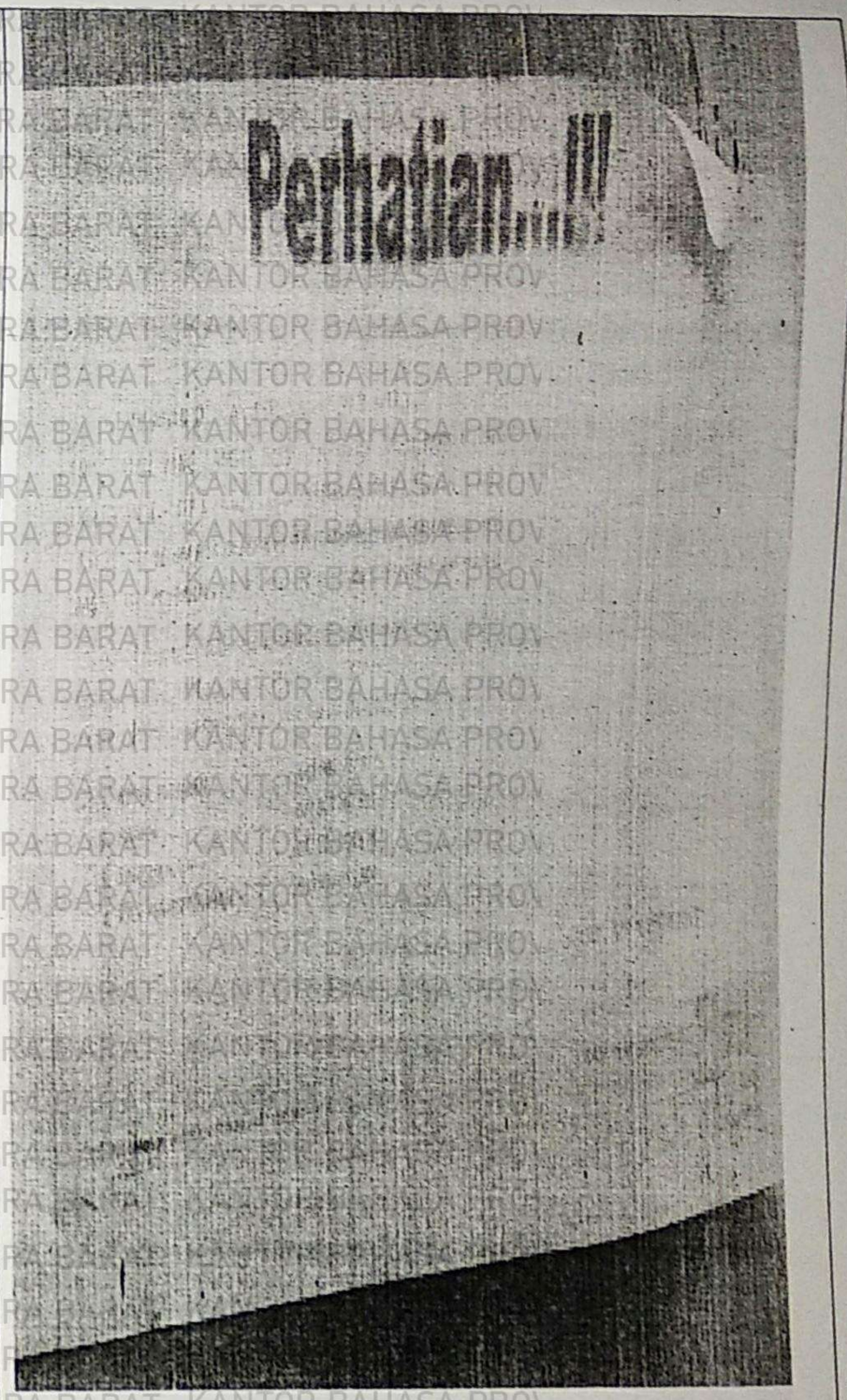
49	DESA BATULAYAR KEC. BATULAYAR KAB. LOMBOK BARAT USIA 0 – 5 TAHUN USIA 6 -10 TAHUN...	- Penulisan Kata - Tanda baca	DESA BATULAYAR, KEC. BATULAYAR, KAB. LOMBOK BARAT USIA 0—5 TAHUN USIA 6—10 TAHUN...
50	DESA BATULAYAR KEC. BATULAYAR KAB. LOMBOK BARAT	- Tanda baca	DESA BATULAYAR, KEC. BATULAYAR, KAB. LOMBOK BARAT
51	-	-	-
52	.... - KABUPATEN LOMBOK BARAT-NTB **untuk** tempat ditentukan oleh masing-masing dusun Hal-hal yang kurang jelas bisa **di tanyakan** kepada sekdes Batulayar 081917245517	- Penulisan Kata - Tanda baca - Ejaan (huruf kapital) - Struktur	...., KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB **Untuk** tempat ditentukan oleh masing-masing dusun. Hal-hal yang kurang jelas bisa **ditanyakan** kepada sekdes Batulayar dengan menghubungi nomor ponsel 081917245517

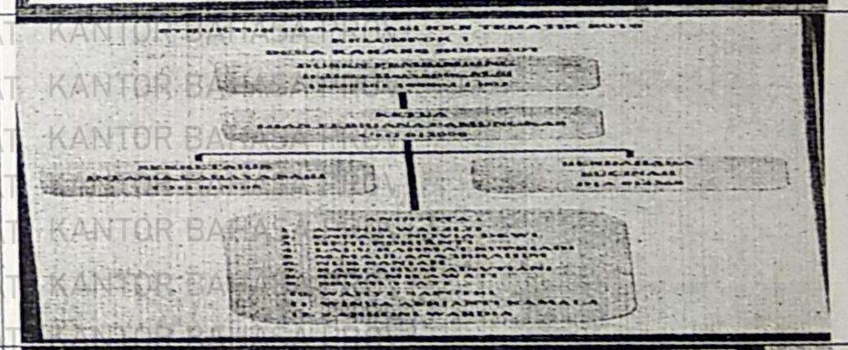
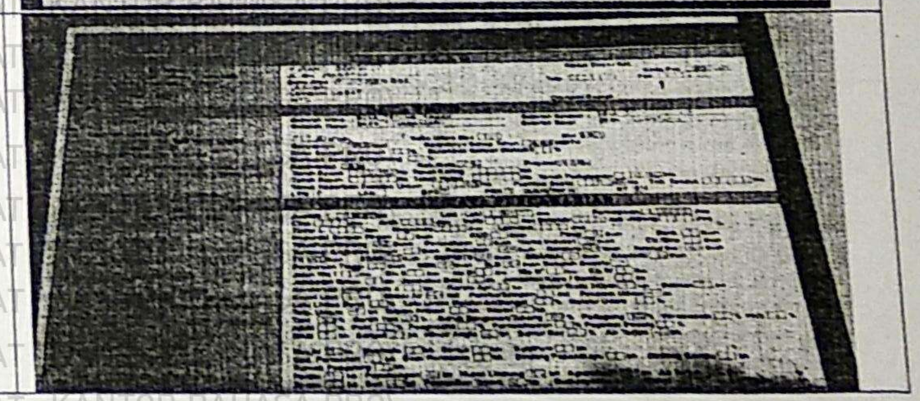


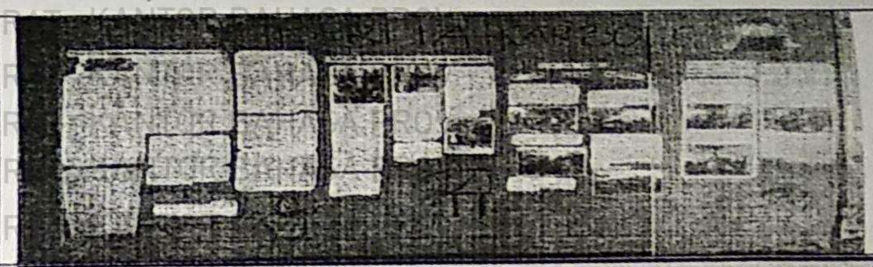
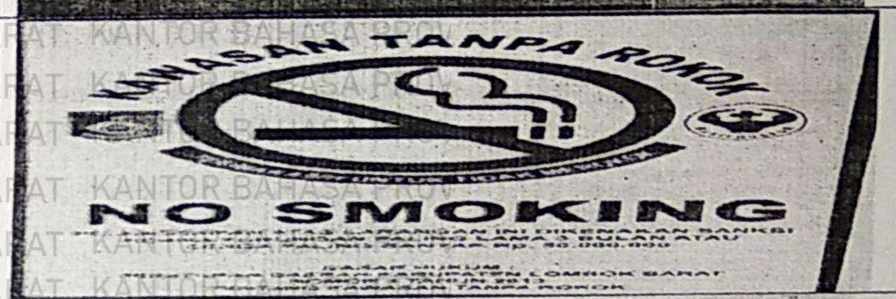
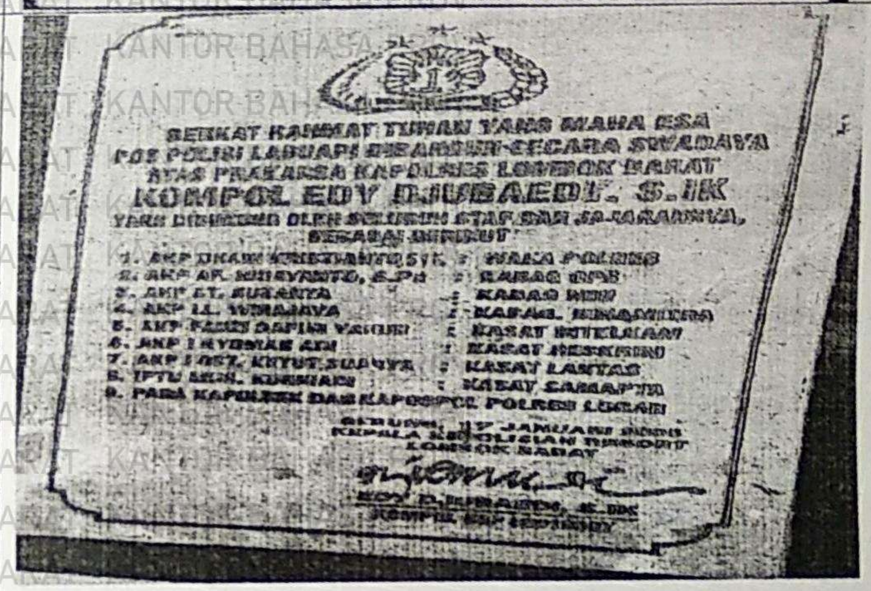
53	-	-	-	
54	-	-	-	
55	UCAPKAN SALAM SEBELUM MASUK SEMOGA KESELAMATAN & KEBERKAHAN ALLAH BERSAMAMU (SEKALIAN)	Bentuk kesalahan yang terdapat pada redaksi tersebut, yakni kealahan dalam pemikihan kata *kamu* yang digabung dengan kata *sekalian*	Redaksi tersebut akan lebih baik dan efektif jika kata *kamu* diganti dengan kata *kalian* karena kata *kamu sekalian* bermakna sama dengan kata *kalian*	
56	-	-	-	

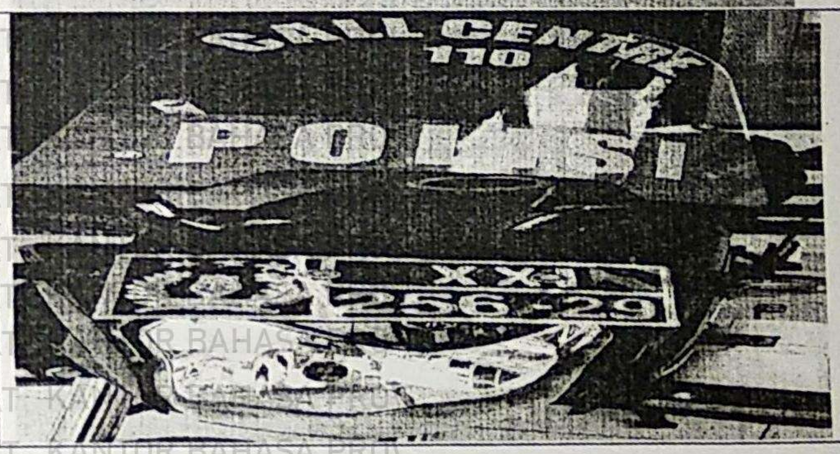
57	Saya No to NARKOBA MEMBUNUH ANAK NEGERI MEMUSNAHKAN GENERASI	Penggunaan istilah asing, penggunaan kalimat tidak bersubjek	Katakan tidak pada narkoba Narkoba membunuh anak negeri Narkoba Memusnahkan generasi	
58	-	-	-	
59	PROSESOR COMPUTER SUDAH LEMAH DAN MOHON MEMPERHATIKAN HAL- HAL BERIKUT INI	1.Penggunaan istilah asing. 2. Pengambilan judul pengumuman salah	Pengumuman 1. Karena prosesor komputer sudah mulai melemah, mohon tunggu proses *loading* selesai dengan sempurna sewaktu menghidupkan komputer	
60	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN LABUAPI KANTOR DESA KARANG BONGKOT Jl. Gunung	Penyingkatan kata jalan menjadi Jl.	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN LABUAPI KANTOR DESA KARANG BONGKOT Jalan Gunung	

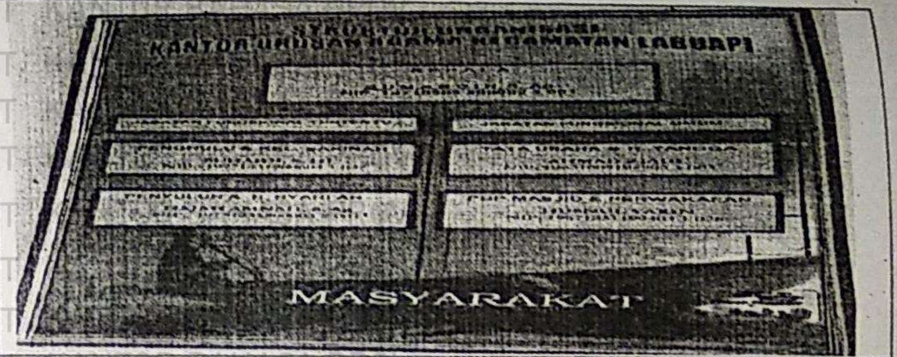
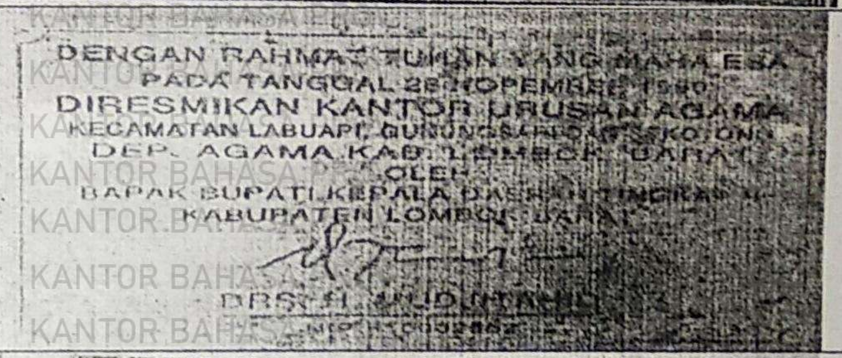
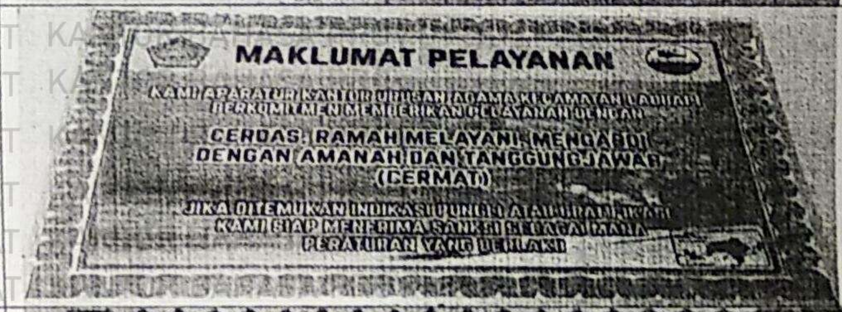
61	IKUTI .....!!! TOURNAMENT KARANG TARUNA CUP 2017	Penggunaan istilah asing pada kata turnamen dan Cup	IKUTI .....!!! TURNAMEN SEPAK BOLA KARANG TARUNA	
62	PENGUMUMAN REKRUTMEN UMU PT PLN PERSERO	Penggunaan istilah asing pada kata *rekrutmen*	PENGUMUMAN PEREKRUTAN UMU PT PLN PERSERO	
63	Jakarta, 29 Januari 2016 Yth. 1. Para Gubernur 2. Para Bupati di- SELURUH INDONESIA Melanjutkan surat edaran nomor	1. Penggunaan nama kota sebelum alamat surat. 2. Penggunaan keterangan tempat *di* pada alamat surat. 3. Penggunaan kalimat tidak bersubjek	29 Januari 2016 Yth. 1. Para Gubernur 2. Para Bupati SELURUH INDONESIA Untuk melanjutkan surat edaran nomor	
64	-	-	-	

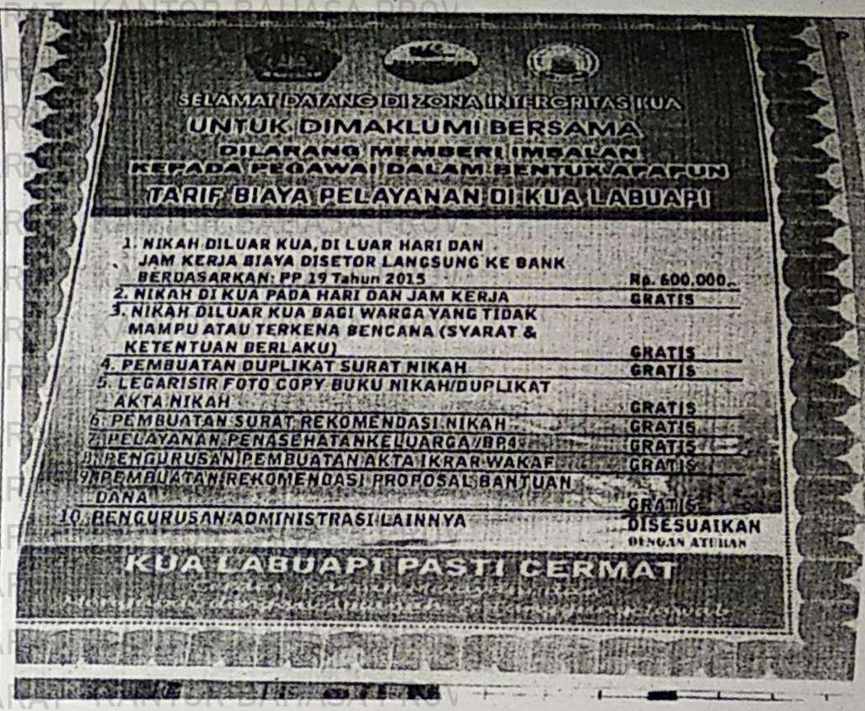
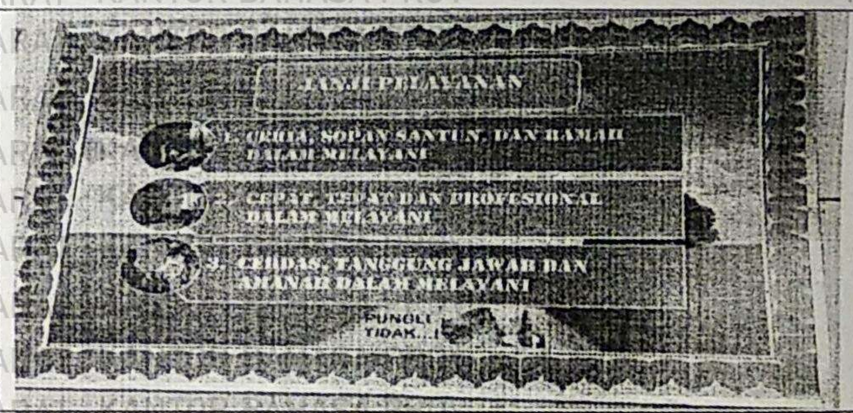
65	SEHUBUNGAN DENGAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SETIAP DAERAH MENGALAMI PENINGKATAN YANG SANGAT TINGGI SEHINGGA MENYEBABKAN PROSES AJUDIKASI ATAU PENGIRIMAN DATA PEREKAMAN E-KTP MENJADI LAMA KARENA ANTRIAN DISERVER PUSAT. OLEH SEBAB ITU HASIL PEREKAMAN ATAU BUKTI PEREKAMAN BELUM BISA DIBERIKAN SEBELUM PROSES AJUDIKASI MEMBERIKAN FEEDBACK/BALASAN (PRINT READY RECORD) SEBAGAI SURAT PENGAJUAN CETAK SURAT KET. PENGANTI KTP ELEKTRONIK MAUPUN KTP ELEKTRONIKNYA. OLEH KARENA ITU DIMOHON KEPADA MASYARAKAT YANG SUDAH PEREKAMAN TAPI BELUM MENERIMA BUKTI REKAM/SURAT PENGANTAR EKTP/SURAT PENGAJUAN	1. Kesalahan dalam pembentukan kata, seperti *mengkonfirmasi, dibawah, rekam, antrian, diserver.* 2. Kesalahan dalam pemilihan kata, seperti *E-KTP, feedback, HP.* 3. Kesalahan dalam bentuk kalimat berupa kalimat yang tidak efektif sehingga susah dipahami oleh pembaca	1. Seharusnya *mengonfirmasi, di bawah, perekaman, antrean, di server.* 2. Seharusnya *KTP Elektronik, balasan, telepon genggam.* 3. Seharusnya *Sehubungan dengan perekaman KTP Elektronik di setiap daerah mengalami penigkatan yang sangat tinggi sehingga pengiriman data perekaman KTP Elektronik terhambat di server pusat, hasil perekaman atau bukti perekaman belum bisa diberikan sebelum adanya balasan sebagai surat pengjuan cetak surat keterangan pengganti KTP Elektronik. sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada masyarakat yang melakukan perekaman tetapi belum menerima bukti perekaman sebagai surat pengantar ke Dukcapil Lombok Barat agar mengonfirmasi data perekamannya melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam berikut ini.*	

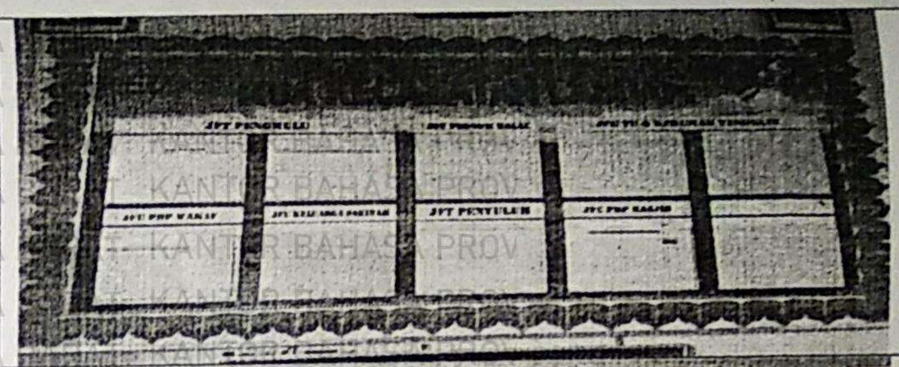
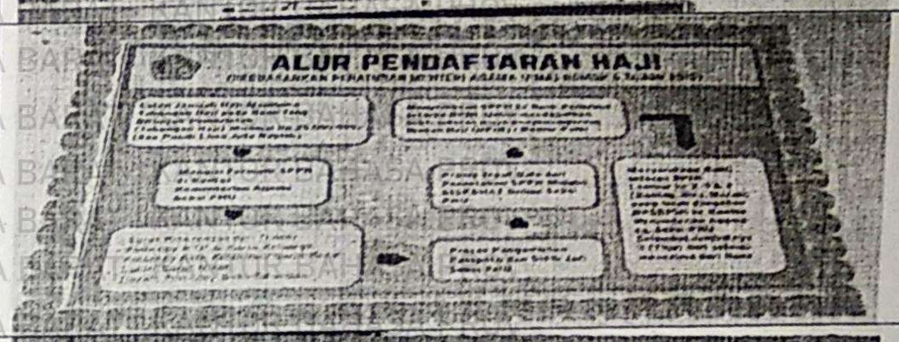
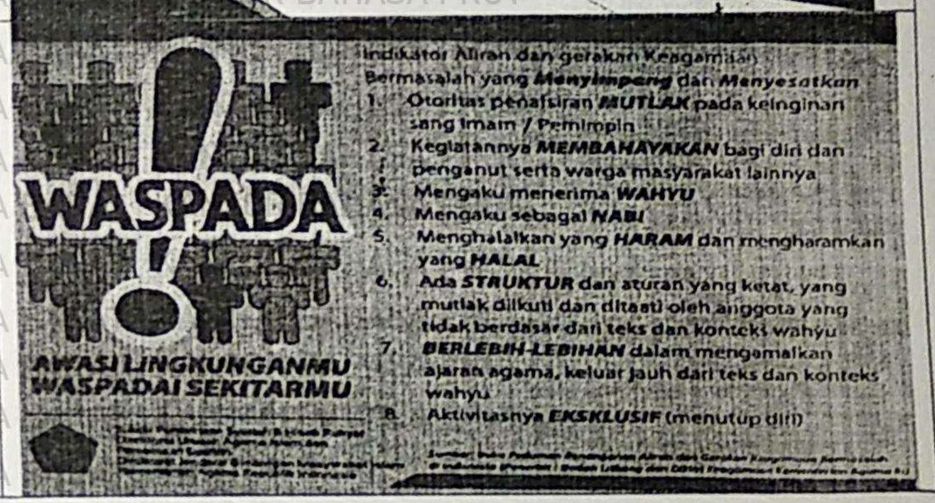
	PENCETAKAN EKTP KE DINAS DUKCAPIL LOMBOK BARAT DI GERUNG UNTUK MENGKONFORMASI DATA PEREKAMANNYA KE OPERATOR KECAMATAN VIA TELEPON/SMS NO. HP DIBAWAH INI.			
66	-	-	-	
				
67	-	-	-	
				
68	-	-	-	

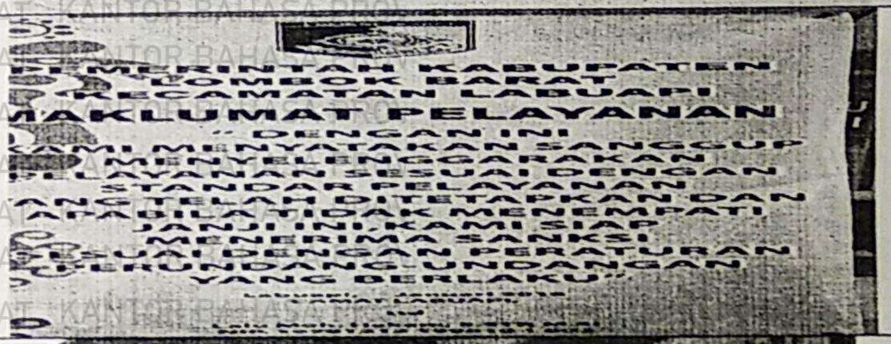
69	-	-	-	
70	No Smoking Terimakasih Rp. 50.000.000	- Penulisan Kata - Penggunaan Istilah asing	Dilarang Merokok Terima kasih Rp50.000.000	
71	BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA POS POLISI LABUAPI DIBANGUN SECARA SWADAYA ATAS PRAKARSA KAPOLRES LOMBOK BARAT KOMPOL EDI DJUBAEDI, S.IK YANG DIDUKUNG OLEH STAF DAN JAJARANNYA, SEBAGAI KERIKUT 1. AKP DHANI KRISTIANTO, SIK: WAKA POLRES 2.	1. KESALAHAN DALAM MENULIS GELAR, SEPERTI *S.IK, SIK.* 2. KESALAHAN DALAM MENULIS AKRONIM, SEPERTI *WAKA POLRES*	1. seharusnya S.I.K. 2. Seharusnya, Wakapolres	
72	KANIT SABHARA SYARIF LUKMAN IPDA NRP. 64100466	Adanya penggunaan anda titik setelah NRP	KANIT SABHARA SYARIF LUKMAN IPDA NRP 64100466	

73	POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT LOMBOK BARAT SEKTOR LABUAPI JL. Gunung Pengsong, Labapi, Kode Pos 83361	1. Penggunaan kata asing pada kata resort. 2. Penyingkatan kata jalan menjadi Jl.	POLRI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK BARAT SEKTOR LABUAPI Jalan Gunung Pengsong, Labapi, Kode Pos 83361	
74	POLICE POLIZIA POLISIS	Penggunaan istilah asing lebih dikedepankan dibanding bahasa Indonesi	POLISI POLICE POLIZIA	
75	-	-	-	
76	CALL CENTER 110 POLISI	Penggunaan istilah asing	PUSAT LAYANAN 110 POLISI	

77	KEPALA SUMRDIN, S.Ag NIP. 19711050220002	1. Penulisan gelar tidak diikuti tanda titik di bagian akhir. 2. Kata NIP dikuti tanda titik	KEPALA SUMRDIN, S.Ag. NIP19711050220002	
78	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PADA TANGGAL 28 NOPEMBER 1990	1. Penulisan kata *maha* dipisah dengan kata *esa* 2. Penulisan kata november menggunakan huruf *p*	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 1990	
79	-	-	-	
80	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN LABUAPI YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATHIN	1. Tidak digunakannya tanda koma sebelum kata sambung dan. 2. Penulisan kata *bathin* yang tidak baku.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN LABUAPI YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN	

81	1. NIKAH DILUAR KUA, DI LUAR HARI DAN JAM KERJA BIAYA DISETOR LANGSUNG KE BANK BERDASARKAN PP: 19 TAHUN 2015 Rp. 600.000 2. NIKAH DI KUA PADA HARI DAN JAM KERJA GRATIS 3. NIKAH DILUAR KUA BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU TERKENA BENCANA (SYARAT DAN KETERNTUAN BERLAKU) GRATIS	1. Adanya penulisan kata depan *di* yang digabung dengan kata luar. 2. Adanya penulisan singkatan kata rupiah yang diikuti tanda titik.	4. NIKAH DI LUAR KUA, DI LUAR HARI DAN JAM KERJA BIAYA DISETOR LANGSUNG KE BANK BERDASARKAN PP: 19 . TAHUN 2015 Rp600.000 5. NIKAH DI KUA PADA HARI DAN JAM KERJA GRATIS. 6. NIKAH DI LUAR KUA BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU TERKENA BENCANA (SYARAT DAN KETERNTUAN BERLAKU) GRATIS	
82	-	-	-	
83	-	-	-	

84	-	-	-	
85	-	-	-	
86	KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUAPI LOMBOK BARAT JL. RAYA GUNUNG PENGSONG	Adanya penyingkatan kata jalan menjadi JL.	KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUAPI LOMBOK BARAT JALAN RAYA GUNUNG PENGSONG	
87	1. Otoritas penafsiran MUTLAK pada keinginan sang Imam/Pemimpin. 2. Kegiatannya MEMBAHAYAKAN bagi diri dan penganut serta warga masyarakat. 3. Mengaku menerima Wahyu. 4. Mengaku sebagai NABI.	Adanya penggunaan huruf kapital yang tidak pada tempatnya	5. Otoritas penafsiran *mutlak* pada keinginan sang Imam/Pemimpin. 6. Kegiatannya *membahayakan* bagi diri dan penganut serta warga masyarakat. 7. Mengaku menerima Wahyu. Mengaku sebagai *nabi*.	

88	Wakaf, Memberdayakan, Dan Menyejahterakan	Adanya penggunaan huruf kapital yang tidak benar	Wakaf, memberdayakan, dan menyejahterakan	
89	-	-	-	
90	-	-	-	
91	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN LABUAPI JL. GUNUG PENGSONG NO. TELP. 0370.6590874	1. Kesalahan dalam menulis singkatan kata jalan	1. Seharusnya ditulis sebagai satu kata *Jalan*	

92	-	-	-	
93	-	-	-	
94	BADAN SAR NASIONAL KANTOR SAR NTB MESS SIAGA RESCUE JL. RAYA RUMAK LOMBOK BARAT	1. Kesalahan dalam pemilihan kata, seperti *, messi* dan *rescue* 2. Kesalahan dalam menyingkat kata jalan	1. Seharunya *Mes Siaga Bencana* 2. Jalan Raya Rumak	
95	GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN BALAI ZAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT JL. RAYA BIL KM 21 GERUNG	1. Kesalahan dalam menyingkat kata *jalan* 2. Kesalahan dalam pemilihan kata *km 21*	1. Seharunya Jalan Raya BIL 2. Nomor gedung harus jelas karena KM 21 itu tidak jelas dari arah mana	

96	STOP PUNGLI!!! CALL/SMS CENTER **STOP**	1. Kesalahan dalam pemilihan kata *call/sms center* 2. Penggunaan Istilah asing	1. Seharusnya *nomor telepon pusat pengaduan* 2. **SETOP**	
97	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JL. JENDERAL SUDIRMAN DASAN GERES	1. Kesalahan dalam menyingkat kata *jalan*	1. Seharusnya *Jalan Sudirman Dasan Geres*	
98	**STOP**	- Penggunaan Istilah asing	**SETOP**	
99	-	-	-	

100	-	-	-	
101	-	-	-	
102	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KECAMATAN GERUNG KELURAHAN DASAN GERES Jln. Jenderal Sudirman	1. Kesalahan dalam menyingkat kata *jalan*	1. Seharusnya Jalan. Jenderal Sudirman	
103	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN LOMBOK BARAT Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang	1. Kesalahan dalam pemilihan kata, seperti kata *kantor* sebelum kata *kabupaten* 2. Kesalahan dalam menyingkat kata *jalan*	1. Seharusnya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang	

104	PEMETINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS TENAGA KERJA Jln. Soekarno-Hatta-Giri Menang-Gerung	1. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan penyingkatan kata *jalan*	PEMETINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS TENAGA KERJA Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung
105	-	-	-
106	-	-	-
107	-	-	-



(DESAIN)
KERANGKA ACUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENELITIAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAGI BADAN PUBLIK DAERAH

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
2017

1. Latar Belakang

Menggunakan Bahasa Indonesia adalah salah satu amanat dari Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda pula, bertekad untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Tekad tersebut dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya sumpah ini dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Sayangnya sumpah menggunakan Bahasa Indonesia ini seakan menjadi sia-sia ketika kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan justru banyak terdapat pelanggaran terhadap keharusan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa, hal tersebut mempersempit ruang pergerakan bahasa Indonesia di hadapan masyarakatnya sendiri. Pelanggaran yang paling memprihatinkan adalah ketika di ruang publik, ruang yang notabennya banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik lokal maupun asing, justru penggunaan bahasa Indonesia seakan dinomor-sekiankan. Misalnya saja, penamaan gedung, jalan, perkantoran, permukiman, lembaga usaha, lembaga pendidikan banyak menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan gengsi dan nilai jual. Padahal, organisasi atau badan usaha tersebut dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Fenomena lain terjadi pada pengguna bahasa itu sendiri, mereka merasa lebih bangga dan terpelajar jika bisa berbicara dengan bahasa asing. Pekerja kantor pun lebih nyaman menggunakan kata *meeting* ketimbang rapat. Istilah *delete* lebih akrab dibanding hapus. Begitu pun *copy* untuk salin, *Network* untuk jejaring, *Download* buat unduh, *workshop* untuk 'sanggar kerja', serta *upload* untuk unggah. Kantor pemerintah atau badan publik adalah tempat-tempat sumber daya manusia yang memiliki pendidikan relatif tinggi. Seharusnya mereka lebih

cerdas dalam memilah kapan dia perlu menggunakan bahasa asing dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Karena, yang membuat bahasa Indonesia lebih memiliki tempat adalah penggunanya itu sendiri.

Untuk melihat fenomena penggunaan bahasa Indonesia dan sikap pengguna bahasa di Badan Publik Daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Barat inilah penelitian dilakukan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daearah ini, dimaksudkan untuk melihat fenomena penggunaan bahasa Indonesia dan sikap pengguna bahasa di badan publik daerah.

b. Tujuan

Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daearah ini, bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa indonesia di badan publik dan sikap pengguna bahasa Indonesia pada badan publik di Kabupaten Lombok Barat.

3. Keluaran

Hasil yang diharapkan dari Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik di Daearah ini adalah tersusunnya laporan penelitian. Laporan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan linguistik dan dapat digunakan untuk menentukan regulasi dan kebijakan, khususnya mengenai kebahasaan di badan publik Kabupaten Lombok Barat serta sebagai rekomemdasi untuk dilakukan pembinaan.

4. Tempat

Lokasi pengambilan data Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik di Daearah ini di Kabupaten Lombok Barat. Ada 20 badan publik yang dijadikan sampel penelitian, yaitu (1) Kantor Kecamatan Batulayar, (2) Kantor Desa Batulayar, (3) Polsek Labuapi, (4) Kantor Kecamatan Labuapi, (5)

Kantor Desa Karang Bongkot, (6) KUA Kecamatan Labuapi, (7) Kantor Sar NTB, (8) Perpustakaan Daerah Lombok Barat, (9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (10) DPPKBPPPA Lombok Barat, (11) BPBD Lombok Barat, (12) BKD Lombok Barat, (13) BPMD Lombok Barat, (14) Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat, (15) Dinas Kehutanan Lombok Barat, (16) Dinas Pertanian Lombok Barat, (16) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat, (17) Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat, (18) Dinas Pariwisata Lombok Barat, (19) Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat, dan (20) Dinas P dan K Lombok Barat.

5. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan Penelitian 2017											
No.	Kegiatan	Bulan ke-									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan										
2	Penyusunan proposal										
3	Penentuan sampel penelitian untuk pengumpulan data										
4	Penyusunan instrumen penelitian										
5	Presentasi proposal										
6	Pengumpulan data										
7	Analisis dan Interpretasi data										
8	Penulisan laporan penelitian										
9	Presentasi hasil penelitian										
10	Revisi dan perbaikan laporan penelitian										
11	Penyerahan laporan										
12	Penggandaan laporan										

6. Bahan Acuan

Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik Daearah ini, bahan yang menjadi acuan kerja antara lain:

a. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Prosedur Operasional Standard Penelitian Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor DIPA023.13.2.660091/2017 revisi ke-1 tanggal 19 Januari 2017.
f. Surat keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 021/G5.21/KP/2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik di Daerah Tahun Anggaran 2017.

7. Tim Peneliti dan Informan

Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan Publik di Daearah ini melibatkan empat orang peneliti/pengkaji, satu orang analis data, dan 40 orang informan.

No.	Nama Peneliti/Informan	Jabatan dalam Penelitian
1.	Siti Raudloh, M.Hum.	Koordinator
2.	Kasman, M.Hum.	Anggota
3.	Yeni Febtaria W., M.A.	Anggota
4.	Asry Kurniawati, S.S.	Anggota
5.	Lukmanul Hakim	Analis Data
6.	Subandi	Informan
7.	Gunawati	Informan
8.	Baiq Rita Setiawan	Informan
9.	Hafsah	Informan
10.	R. Haryono Hendro Prayitno	Informan
11.	Suhaidi	Informan
12.	Muaidi	Informan
13.	Samsul Hanan	Informan
14.	Lalu Heru Anjas Suwari	Informan
15.	M. Abu Ali Imron	Informan
16.	I Ketut Mukada	Informan
17.	M. Risalah	Informan
18.	Iwa Kusuma S.	Informan
19.	Saeti	Informan

20.	M. Zaki	Informan
21.	Gusti Wace	Informan
22.	Siti Zubaidah	Informan
23.	Ratna Ningsih	Informan
24.	Herman Rogo	Informan
25.	Baiq Hadilah	Informan
26.	Taukid Al Fahmi	Informan
27.	Nurbijah	Informan
28.	Abdurrahman	Informan
29.	Harun Ar Rasid	Informan
30.	Semaun	Informan
31.	Ratih Sosilawati	Informan
32.	Asti Handayani	Informan
33.	Sahid	Informan
34.	Ida Ayu Made S.	Informan
35.	Helan Saofi	Informan
36.	Sanyo Wena Putra	Informan
37.	Minggasa AdiShora	Informan
38.	Fatimah	Informan
39.	Rohani	Informan
40.	Gusti Ayu Is, S.H.	Informan
41.	Srie Indrawaty	Informan
42.	Safiah	Informan
43.	Sukamin	Informan
44.	Ellya	Informan
45.	Hanna	Informan

8. Biaya

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini dibebankan kepada DIPA Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor DIPA023.13.2.660091/2017 revisi ke-1 tanggal 19 Januari 2017.